



**ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN  
EFEKTIVITAS PAD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR UNTUK PERIODE ANGGARAN  
2010-2014**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Rizti Riadi  
022114709

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**NOVEMBER 2016**

ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN  
EFEKTIVITAS PAD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR UNTUK PERIODE ANGGARAN  
2010-2014

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.)

**ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN  
EFEKTIVITAS PAD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR UNTUK PERIODE ANGGARAN  
2010-2014**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

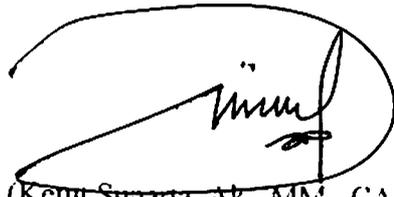
Pada Hari: Sabtu, Tanggal: 29/10/2016

Rizti Riadi

022114709

Menyetujui,

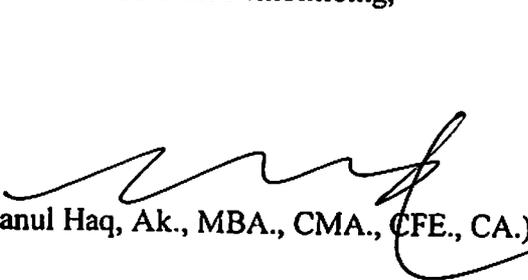
Dosen Penilai,



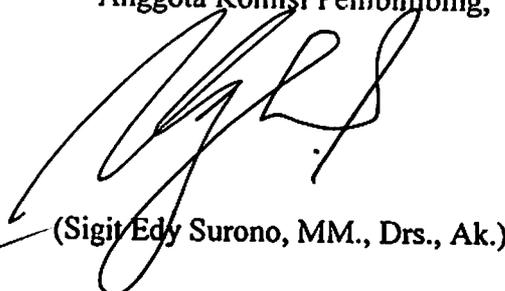
(Ketut Sumarta, Ak., MM., C.A.)

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,



(H. Akhsanul Haq, Ak., MBA., CMA., CFE., CA.)



(Sigit Edy Surono, MM., Drs., Ak.)

## ABSTRAK

RIZTI RIADI, NPM: 022114709, Program Studi: Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2010-2014, di bawah bimbingan: Akhsanul Haq dan Sigit Edy Surono, 2016.

---

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini telah terjadi ketidakkonsistenan antara pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD terhadap tingkat rasio pertumbuhan PAD yang berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014.

Penelitian mengenai analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014, menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014, adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*, metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS 20), sedangkan untuk menguji pengaruh antara kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan digunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa secara simultan variabel Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan perhitungan statistik uji F signifikansi sebesar 0,027 berada di bawah 0,05. Secara parsial variabel Kemandirian Keuangan Daerah memiliki  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $4,453 > 2,110$  dengan taraf signifikansi 0,040 di bawah signifikansi 0,05% (5%) hasil ini membuktikan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Variabel Efektivitas PAD memiliki  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $0,245 < 2,110$  dengan taraf signifikansi 0,789 di atas 0,05% (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Hasil uji koefisien korelasi ( $R^2$ ), diketahui bahwa secara simultan Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Kota Bogor untuk periode anggaran tahun 2010-2014 sebesar 85,9% sedangkan sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tahun 2010-2014 ditemukan masih banyak PAD di Kota Bogor yang belum dikelola secara optimal antara lain retribusi parkir kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan kurang intensifnya pengawasan Pemerintah Kota Bogor terhadap potensi PAD yang ada. Untuk meningkatkan penerimaan PAD secara intensif dan tepat sasaran terutama pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilaksanakan strategi melalui intensifikasi yaitu perbaikan aspek pendataan agar selalu diperbaharui, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta pengawasan secara berkelanjutan.

Tahun 2013 ditemukan bahwa realisasi penerimaan PAD belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan belum ada peraturan/standar baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemungutan dan penyetoran PAD ke kas daerah, dengan mempertimbangkan segi efektivitas dan efisiensi biaya dalam memungut PAD tersebut. Pemerintah Daerah Kota Bogor harus melakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan sistem *on line* dengan tetap melakukan efisiensi biaya sehingga diperoleh ukuran yang lebih baik pada tingkat efektivitas pemungutan PAD.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN EFEKTIVITAS PAD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR UNTUK PERIODE ANGGARAN 2010-2014”**. Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta atas segala dukungan dan motivasi baik moril maupun materil serta doa yang tak henti-hentinya yang tak mungkin terbalas sampai kapanpun.
2. Ketiga adik tercinta yang selalu mendukung.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, M. Si., SE. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak H. Akhsanul Haq, Ak., MBA., CMA., CFE., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
7. Bapak Sigit Edy Surono, MM., Drs., Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
8. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA. selaku Dosen penilai dan penguji skripsi.
9. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, SE. selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
10. Dosen-dosen Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
11. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pelaksana Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
12. Staff Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam melengkapi literatur untuk penulisan skripsi.

13. Teman-teman kuliah Strata 1 pada Program Studi Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan dan kebersamaannya dari awal kuliah sampai saat ini.

14. Dan semua pihak yang telah membantu, terimakasih banyak untuk setiap dukungan dan doa kalian.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kepada mereka yang telah membantu penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan dan masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan terbuka untuk penyempurnaan di masa datang.

Bogor,                      November 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	10
1.2.1. Perumusan Masalah .....	10
1.2.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	11
1.3.1. Maksud Penelitian.....	11
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	13
2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	13
2.1.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.2.1.1. Pajak Daerah .....	17
2.2.1.2 . Retribusi Daerah .....	17
2.2.1.3 . Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan .....	18
2.2.1.4 . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	18
2.2.2. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah .....	18
2.2.3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	19
2.3. Dana Perimbangan/ Transfer/ <i>Grants</i> .....	19
2.4. Kemandirian Keuangan Daerah.....	21
2.4.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
2.4.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	23
2.5. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	24
2.5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	

	Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.5.2.	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.6.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	27
2.6.1.	Penelitian Sebelumnya .....	27
2.6.2.	Kerangka Pemikiran .....	30
2.7.	Hipotesis Penelitian .....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	35
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	35
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	35
3.4.	Operasionalisasi Variabel .....	36
3.5.	Metode Penarikan Sampel .....	37
3.6.	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.7.	Metode Pengolahan/ Analisis Data.....	38
3.7.1.	Statistik Deskriptif .....	39
3.7.2.	Pengujian Asumsi Klasik .....	39
3.7.2.1.	Uji Normalitas .....	39
3.7.2.2.	Uji Heteroskedastisitas .....	40
3.7.2.3.	Uji Multikolinearitas.....	40
3.7.2.4.	Uji Autokorelasi.....	41
3.7.3.	Pengujian Hipotesis .....	41
3.7.3.1.	Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) .....	41
3.7.3.2.	Uji Signifikasi Simultan (Uji F) .....	42
3.7.3.3.	Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik R <sup>2</sup> ) .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.1.1.	Sejarah Kota Bogor .....	45
4.1.2.	Visi dan Misi Kota Bogor .....	48
4.2.	Analisis Variabel Penelitian .....	48
4.2.1.	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	48
4.2.2.	Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas) Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	52
4.2.3.	Analisis Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor .....	56
4.3.	Analisis Data .....	59
4.3.1.	Analisis Deskriptif Statistik .....	59
4.3.2.	Uji Asumsi Klasik .....	61
4.3.2.1.	Uji Normalitas .....	61
4.3.2.2.	Uji Multikolonieritas .....	63
4.3.2.3.	Uji Autokorelasi .....	64

4.3.2.4.	Uji Heteroskedastisitas .....	65
4.3.3.	Analisis Regresi Linear Berganda .....	66
4.3.4.	Pengujian Hipotesis .....	67
4.3.4.1.	Pengujian Hipotesis Parsial (Uji Statistik t) ....	67
4.3.4.2.	Pengujian Hipotesis Simultan (Uji Statistik F)	68
4.3.4.3.	Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	69
4.4.	Interpretasi Hasil Penelitian .....	70
4.4.1.	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) .....	71
4.4.2.	Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas) terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) .....	73
4.4.3.	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas) terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) .....	74
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
5.1.	Simpulan .....	77
5.2.	Saran .....	78

#### **JADWAL PENELITIAN**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Dana Transfer Kota Bogor Tahun 2010-2014.....	6
Tabel 2 Target dan Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2010-2014.....	6
Tabel 3 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 .....	7
Tabel 4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	24
Tabel 5 Kriteria Efektivitas PAD .....	27
Tabel 6 Hasil Penelitian Terdahulu Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan .....	29
Tabel 7 Operasionalisasi Variabel .....	37
Tabel 8 Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 .....	48
Tabel 9 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemeritah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	49
Tabel 10 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	51
Tabel 11 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	53
Tabel 12 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	54
Tabel 13 Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	56
Tabel 14 Hasil Statistik Deskriptif .....	59
Tabel 15 Hasil Uji Normalitas .....	62
Tabel 16 Hasil Uji Multikolonieritas .....	64
Tabel 17 Hasil Uji Autokorelasi .....	64
Tabel 18 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	65
Tabel 19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	66
Tabel 20 Hasil Uji Statistik t .....	68
Tabel 21 Hasil Uji Statistik F .....	69
Tabel 22 Hasil Uji Koefisien Korelasi Rasio Kemandirian .....	69

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 23 Hasil Uji Koefisien Korelasi Rasio Efektivitas PAD .....	70
Tabel 24 Rasio Kemandirian, Kinerja Keuangan, dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010–2014 .....	71
Tabel 25 Rasio Efektivitas PAD, Kinerja Keuangan, dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010–2014.....	73
Tabel 26 Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Rasio Pertumbuhan PAD .....	19
Gambar 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	23
Gambar 3 Rasio Efektivitas PAD .....	26
Gambar 4 Kerangka Pemikiran Teoretis Pengaruh Variabel $X_1$ dan $X_2$ Secara Bersama-sama Berpengaruh Pada Variabel Y.....	32
Gambar 5 Paradigma Penelitian Mengenai Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y Pada Lokasi Penelitian Tertentu .....	33
Gambar 6 Persamaan Regresi Berganda .....	39
Gambar 7 Rumus Uji Statistik t .....	42
Gambar 8 Rumus Uji Statistik F .....	42
Gambar 9 Rumus Uji Statistik $R^2$ .....	43
Gambar 10 P Plot Normalitas .....	62

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 .....	7
Grafik 2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	49
Grafik 3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	50
Grafik 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	51
Grafik 5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	54
Grafik 6 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 .....	55
Grafik 7 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 .....	57
Grafik 8 Normalitas .....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban Pemerintah Pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi

tingkat lokal atau daerah (Bastian, 2001). Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu Pemerintah Daerah otonom melaksanakan otonomi penuh.

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010:2). Terdapat dua alasan utama mengapa Pemerintah Daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah kepada pegawai Pemerintah Daerah dan DPRD.
2. Dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Halim

(2001:123) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya; dan
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan Pemerintah Daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak serta merta mau kehilangan kendali atas Pemerintah Daerah. Kuncoro (2002:98) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu:

1. Dominannya transfer dan pusat;
2. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan;
4. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; dan
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis *shift*), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis *share*).

Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, indikator yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer Pemerintah Pusat/pinjaman. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membandingkan realisasi dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dapat menggunakan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, yaitu menghitung selisih realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100% (seratus persen). Namun, semakin tinggi rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2002:128).

Ada beberapa teori menurut Halim (2012:146) yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah yang disebabkan oleh semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah akan berpengaruh terhadap tingginya rasio pertumbuhan PAD dan menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja keuangan, dan sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah akan berpengaruh terhadap menurunnya rasio pertumbuhan PAD dan menunjukkan kinerja keuangan yang menurun.

2. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD akan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik dalam mengembangkan potensi riil daerahnya, hal ini ditunjukkan melalui kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah masing-masing.

Dengan demikian, semakin tinggi rasio efektivitas PAD akan berpengaruh terhadap tingginya rasio pertumbuhan PAD dan menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja keuangan, dan sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas PAD akan berpengaruh terhadap menurunnya rasio pertumbuhan PAD dan menunjukkan kinerja keuangan yang menurun.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002:169).

Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah dan penilaian kinerja keuangan daerah otonomi agar dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Daerah Otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya dibidang keuangan. Pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan di hadapan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, pertanggungjawaban tersebut belum dilengkapi dengan informasi tentang bagaimanakah kinerja keuangan dan berbagai dimensi keuangan daerah otonom agar dapat diperoleh penilaian kinerja keuangan yang lebih komprehensif dalam melaksanakan otonomi keuangan daerah. Dalam kaitan ini sangatlah relevan dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah otonom di Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Jawa Barat. Sebagai Pemerintah Daerah tentu memiliki berbagai fenomena dan permasalahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial masyarakat. Salah satu masalah yang muncul adalah masalah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang merupakan masalah yang sangat rumit terutama di era otonomi daerah dan sekaligus reformasi saat ini. Dimana selama ini belum dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang dijalankan Pemerintah Daerah sekarang. Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Berikut ini akan penulis uraikan data-data mengenai perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang diukur dengan rasio efektivitas PAD, dan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio pertumbuhan PAD. Secara rinci target dan realisasi PAD, penerimaan dana transfer, dan tingkat pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014 disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1.  
Dana Transfer Kota Bogor Tahun 2010-2014

(Dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	148.687	120.803	133.540	39.186	93.257
DANA ALOKASI UMUM	426.093	472.888	603.531	400.470	732.337
DANA ALOKASI KHUSUS	9.756	8.524	4.570	7867	33.477
<b>JUMLAH DANA TRANSFER</b>	<b>584.537</b>	<b>602.216</b>	<b>741.642</b>	<b>447.523</b>	<b>859.072</b>

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis, 2015

Tabel 2.  
Target dan Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2010-2014

(Dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014	
	TARGET	REALISASI								
PAJAK DAERAH	60.906	66.505	141.668	165.397	182.062	224.746	240.062	153.458	343.851	376.488
RETRIBUSI DAERAH	32.659	36.492	37.374	34.681	32.639	35.951	40.761	44.689	75.292	77.181
KEKAYAAN DAERAH	14.976	15.138	14.861	13.784	15.181	18.181	16.192	9.760	23.390	23.682
LAIN-LAIN PAD YANGSAH	12.514	11.164	11.267	15.318	14.277	16.307	19.029	15.219	40.481	34.393
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>121.055</b>	<b>129.299</b>	<b>205.168</b>	<b>229.180</b>	<b>244.159</b>	<b>295.185</b>	<b>316.044</b>	<b>223.127</b>	<b>483.014</b>	<b>511.744</b>

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis, 2015

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu

pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Berikut ini akan penulis uraikan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014 dalam Tabel 3 dan Grafik 1 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.  
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
	TARGET PAD	121.055.189.256	205.168.423.671	244.158.817.237	316.043.842.282	483.014.420.704
	REALISASI PAD	129.298.795.670	229.179.989.410	295.184.798.441	223.126.808.986	511.743.684.270
	RASIO EFEKTIFITAS (%)	106,81	111,70	120,90	70,60	105,95
	KENAIKAN/ (PENURUNAN) RASIO EFEKTIFITAS (%)	-	4,89	9,20	(50,30)	35,35
2	<b>DANA TRANSFER</b>					
	PENERIMAAN DANA TRANSFER	584.537.928.387	602.216.655.331	741.642.341.988	447.523.639.517	859.072.322.269
	RASIO KEMANDIRIAN (%)	22,12	38,06	39,80	49,86	59,57
	KENAIKAN/ (PENURUNAN) RASIO KEMANDIRIAN (%)	-	15,94	1,75	10,06	9,71
3	<b>PERTUMBUHAN PAD</b>					
	PERTUMBUHAN PAD	40.075.795.670	99.881.193.740	66.004.809.031	(72.057.989.455)	288.616.875.284
	RASIO PERTUMBUHAN PAD (%)	44,92	77,25	28,80	24,41	129,35
	KENAIKAN/ (PENURUNAN) PERTUMBUHAN PAD (%)	-	32,33	(48,45)	(4,39)	104,94

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), data diolah penulis, 2015



Grafik 1.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014

Berdasarkan hasil analisis Tabel 3 dan Grafik 1 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014 sebagai berikut:
  - a. Tahun 2010-2011 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 15,94% hal ini berpengaruh terhadap kenaikan rasio pertumbuhan PAD sebesar 32,33% yang berarti bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun tersebut.
  - b. Tahun 2011-2012 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,75% namun hal ini tidak berpengaruh terhadap rasio pertumbuhan PAD karena di tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 48,45%, hal ini disebabkan oleh besar pertumbuhan PAD pada tahun 2012 hanya sebesar 28,80% dibandingkan dengan tahun 2011, yang menurut teori hal ini menunjukkan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
  - c. Tahun 2012-2013 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 10,06% namun hal ini tidak berpengaruh terhadap rasio pertumbuhan PAD karena di tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 4,39% yang menurut teori hal ini menunjukkan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
  - d. Tahun 2013-2014 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 9,71% hal ini berpengaruh terhadap kenaikan rasio pertumbuhan PAD sebesar 104,94% yang berarti bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun tersebut.
2. Pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014 sebagai berikut:
  - a. Tahun 2010-2011 rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 4,89% hal ini berpengaruh terhadap kenaikan rasio pertumbuhan PAD sebesar 32,33% yang berarti bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun tersebut.
  - b. Tahun 2011-2012 rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 9,20% namun hal ini tidak berpengaruh terhadap rasio pertumbuhan PAD karena di tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 48,45%, hal ini disebabkan oleh besar pertumbuhan PAD pada tahun 2012 hanya sebesar 28,80% dibandingkan dengan tahun 2011, yang menurut teori hal ini menunjukkan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

- c. Tahun 2012-2013 rasio efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 50,30%, hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan PAD pada tahun 2013 yang hanya mencapai realisasi sebesar 70,60%, hal ini berpengaruh terhadap penurunan rasio pertumbuhan PAD sebesar 4,39% yang menurut teori hal ini menunjukkan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- d. Tahun 2013-2014 rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 35,35% hal ini berpengaruh terhadap kenaikan rasio pertumbuhan PAD sebesar 104,94% yang berarti bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfionita Putri Yuana (2014) tentang "Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Ketimpangan Regional di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)", menunjukkan bahwa secara langsung rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan, sedangkan secara tidak langsung rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi. Sementara, rasio kemandirian keuangan daerah secara langsung memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan regional, namun rasio efektivitas PAD secara langsung memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan regional, sehingga rasio efektivitas PAD dihilangkan menggunakan metode *trimming*. Metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut adalah metode analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan aplikasi software SPSS versi 15.

Selanjutnya Hony Adhiantoko (2013) telah melakukan penelitian tentang "Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011". Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Kesimpulan penelitian ini adalah rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Blora, namun secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Blora.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil analisis Tabel 3 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas

PAD setiap tahun tapi tidak diikuti oleh rasio pertumbuhan PAD, yang justru mengalami kenaikan/penurunan rasio yang fluktuatif setiap tahun, sehingga pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan masih harus diteliti dan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan data antara fluktuasi rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD terhadap tingkat rasio pertumbuhan PAD yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan yang lebih komprehensif pada Pemerintah Daerah Kota Bogor berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan PAD. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Periode Anggaran 2010-2014”.

## **1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan masalah berdasarkan kesenjangan antara hasil penelitian terdahulu dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu telah terjadi kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD setiap tahun tapi tidak diikuti oleh rasio pertumbuhan PAD, yang justru mengalami kenaikan/penurunan rasio yang fluktuatif dan besar rasionya tidak proporsional setiap tahun. Hal ini berarti telah terjadi ketidakkonsistenan antara fluktuasi rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD terhadap tingkat rasio pertumbuhan PAD yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014.

### **1.2.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang penulis uraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah untuk penelitian ini dengan menggunakan indikator rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014?

2. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014?
3. Apakah kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dengan cara mengetahui pengaruh diantara variabel-variabel penelitian, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan, dengan cara meneliti apakah kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014?
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014?
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik
  - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya Akuntansi Pemerintahan tentang kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

**b. Bagi Pembaca**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD, dan berguna untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang sama.

**2. Kegunaan Praktik**

**a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor dari waktu ke waktu selama periode 5 (lima) tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangannya pada periode-periode berikutnya.

**b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014.

**c. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

**d. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir skripsi dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006:274) "Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi".

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Menurut Nordiawan (2010:158):

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Menurut Hendro Sumarjo (2010:150):

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Hony Adhiantoko, 2013:10) yaitu:

##### 1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas.

## 2. Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

## 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

## 4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Organisasi sektor publik yang salah satunya Pemerintah Daerah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

### 2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan seperti yang dijelaskan Mardiasmo (2002:121), yaitu:

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah;
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Abdul Halim (2007:230) pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah;
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berikut ini tujuan penilaian kinerja pada organisasi sektor publik menurut Mahmudi (2007:158), yaitu:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus lebih baik daripada sekarang.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan

Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.

5. Memotivasi pegawai

Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*.

6. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang

menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat (18) bahwa:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002:132):

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38):

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sah:
  - a. Hasil pajak daerah;
  - b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari:
  - a. Sumbangan dari pemerintah;
  - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pendapatan lain-lain yang sah.

### **2.2.1.1 Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, jenis pendapatan pajak untuk Provinsi meliputi objek pendapatan berikut: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak Kabupaten/Kota tersusun atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan Pajak parkir.

### **2.2.1.2 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk Provinsi jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi pengujian kapal perikanan.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut: Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil, Retribusi pelayanan pemakaman, Retribusi pelayanan pengabuan mayat, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi pengujian kapal perikanan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah,

Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, Retribusi jasa usaha tempat pelelangan, Retribusi jasa usaha terminal, Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila, Retribusi jasa usaha penyodotan kakus, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal, Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air, Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, Retribusi izin trayek.

### **2.2.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

### **2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaitu jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut.

Menurut Damang (2011:176) Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

### 2.2.3 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Abdul Halim, 2002:126). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Ihyaul Ulum (2009:30):

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (*growth ratio*) adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya.

Dengan mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Rasio pertumbuhan PAD dapat diformulasikan dalam Gambar 1 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Gambar 1.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Ihyaul Ulum (2009:30)

Keterangan :

$X_n$  = tahun yang dihitung (ex: 2011)

$X_{n-1}$  = tahun sebelumnya (ex : 2010)

### 2.3 Dana Perimbangan/Transfer/Grants

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004:

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan disebut juga transfer atau *grants*. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Menurut Abdullah

dan Halim (2003:150) tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dana perimbangan dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak. Dana bagi hasil sebagaimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dibagi menjadi:
  - a. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam;
  - b. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
    - 3) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
  - c. Dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    - 1) Kehutanan;
    - 2) Pertambangan umum;
    - 3) Perikanan;
    - 4) Pertambangan minyak bumi;
    - 5) Pertambangan gas bumi; dan
    - 6) Pertambangan panas bumi.
2. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan

berdasarkan imbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Sidik (2002:112) Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut transfer atau *block grant* dari Pemerintah Pusat penting untuk Pemerintah Daerah dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri.

3. Dana alokasi khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.
4. Dana perimbangan dari Provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Peraturan Daerah yang dibenarkan dalam Undang-Undang tersebut untuk mengatur adanya dana perimbangan, hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

#### **2.4 Kemandirian Keuangan Daerah**

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

Kemandirian keuangan daerah berarti Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Kemudian Dwirandra (2008:133) mengemukakan bahwa:

Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola

dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Pengertian kemandirian keuangan daerah juga dikemukakan oleh Abdul Halim (2008:232) sebagai berikut:

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

#### **2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Hessel Nogi (2007:82) dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah;
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah;
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah;
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Hessel Nogi (2007:89) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolok ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sedangkan Harun Hamrolie (1990:47) secara lebih khusus mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Potensi wajib pajak;
2. Potensi besarnya pajak yang ditetapkan;

3. Efektivitas pemungutan pajak;
4. Tarif pajak;
5. Dasar pajak (*tax base*).

#### 2.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini digunakan untuk memperoleh gambaran kuantitatif terhadap besarnya sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari total Pendapatan Asli Daerah selama periode tertentu (satu tahun) dibandingkan dengan total Dana Transfer (satu tahun) yang mencerminkan seberapa besarnya kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul Ulum (2009:30):

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Perimbangan atau Transfer. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan dalam Gambar 2 sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Gambar 2.  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Ihyaul Ulum (2009:30)

Keterangan :

Rasio KKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin

tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah.

Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam rasio seperti tampak pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4.**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	> 25 - 50	Konsultatif
Sedang	> 50 - 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (2001:168)

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi Pemerintah Pusat;
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah Pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada Pemerintah Daerah.

## **2.5 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata dasar *efektive* yang artinya berhasil, ditaati. Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi

(lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan.

Menurut Jones dan Pendlebury (2000:164) “Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam menggapai tujuan”.

Kemudian menurut Gie T.L. (1986:166) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki”. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Selanjutnya menurut Steers R.M. (1985:166) “Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum”. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil menggapai tujuan yang layak dicapai.

Sedangkan menurut Adisasmita R. (2006:143) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”.

Menurut Susilo (1998:118):

Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Gibson (2006:157) mendefinisikan:

Efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan.

Selain beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, pengertian efektivitas lebih khusus dan berhubungan dengan derajat keberhasilan pemerintah dalam hal urusan keuangan telah dikemukakan oleh Devas (1989:43):

Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Kemudian menurut Sumadji P (2006:277) “Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa “Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jadi hasil dari perbandingan tersebut menunjukkan tingkat efektivitas PAD, semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah tersebut.

### 2.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah keberhasilan suatu organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi pemerintah didalam mengemban tugas pokok dan fungsi pemerintahan dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor penentu efektivitas menurut Munir (2001:45), sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana;
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional;
3. Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas;
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat;
5. Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna untuk percepatan pencapaian sasaran/tujuan.

### 2.5.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas keuangan daerah adalah rasio efektivitas keuangan daerah. Menurut Ihyaul Ulum (2009:30):

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah. Rasio efektivitas PAD dapat diformulasikan dalam Gambar 3 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Gambar 3.  
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Ihyaul Ulum (2009:30)

Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta tingkat efektivitas keuangan daerah dapat disajikan dalam rasio seperti tampak pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.  
Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Mahmudi (2010:158)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100% (seratus persen). Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target pada Laporan Realisasi Anggaran dengan tujuan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan.

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) telah melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2007-

2011". Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Kesimpulan penelitian ini adalah rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Blora, namun secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Blora.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dalam skripsinya yang berjudul "Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas terhadap Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar) Tahun 2000-2004". Teknik analisis data yaitu metode *Time Series* untuk rasio kemandirian keuangan daerah dan metode *Cross Section* untuk rasio efektivitas PAD. Kesimpulan penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) yang disusun dalam sebuah skripsi "Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006-2010". Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011) yang berjudul "Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009". Teknik analisis menggunakan analisis rasio keuangan. Kesimpulan penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Andita Puspita Wardhani (2011) yang berjudul "Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010". Teknik analisis menggunakan analisis rasio keuangan. Kesimpulan penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.

Dari uraian sebelumnya, maka akan disajikan Tabel 6 mengenai hasil penelitian terdahulu analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan, sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan**

No	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	<p>Hony Adhiantoko (2013)</p> <p>Judul Penelitian:            “Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011”</p>	<p>Variabel Independen:            Kemandirian dan Efektivitas</p> <p>Variabel Dependen :            Kinerja Keuangan</p>	<p>Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, namun secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan</p>
2	<p>Fitriyah Agustin (2007)</p> <p>Judul Penelitian:            “Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas terhadap Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010-2014)</p>	<p>Variabel Independen:            Kemandirian dan Efektivitas</p> <p>Variabel Dependen :            Kinerja Keuangan</p>	<p>Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.</p>
3	<p>Sri Widada (2012)</p> <p>Judul Penelitian:            “Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006-2010”</p>	<p>Variabel Independen:            Kemandirian dan Efektivitas</p> <p>Variabel Dependen :            Kinerja Keuangan</p>	<p>Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.</p>

**Tabel 6.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan**

No	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4	Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011) Judul Penelitian: “Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009”	Variabel Independen: Kemandirian dan Efektivitas  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.
5	Andita Puspita Wardhani (2011) Judul Penelitian: “Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010”	Variabel Independen: Kemandirian dan Efektivitas  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.

### 2.6.2 Kerangka Pemikiran

Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoretis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah baik, maka Pemerintah Daerah harus mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerja keuangannya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolok ukur apakah kinerja Pemerintah Daerah meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui secara transparan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja Pemerintah Daerah.

Penulis akan meneliti kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD, yang kemudian akan disimpulkan dengan cara melihat grafik perbandingan rasio-rasio dari setiap periode selama 5 (lima) tahun, dan melihat pengaruh antara kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode anggaran 2010-2014.

Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan:

#### 1. Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, kemandirian keuangan daerah berarti Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Abdul Halim (2008:232) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif pada peningkatan kinerja keuangan.

#### 2. Pengaruh efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Kemudian menurut Sumadji P (2006:277) efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) menyatakan bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa peningkatan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan.

### 3. Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan

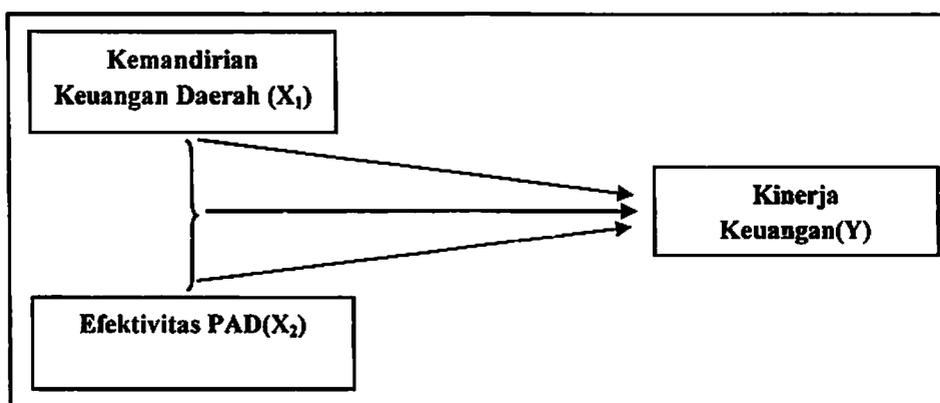
Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dan didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu lainnya seperti Sri Widada (2012), Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011), dan Andita Puspita Wardhani (2011), menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan maka Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah dan peningkatan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan.

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Menurut Sugiyono (2013:60):

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.

Dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

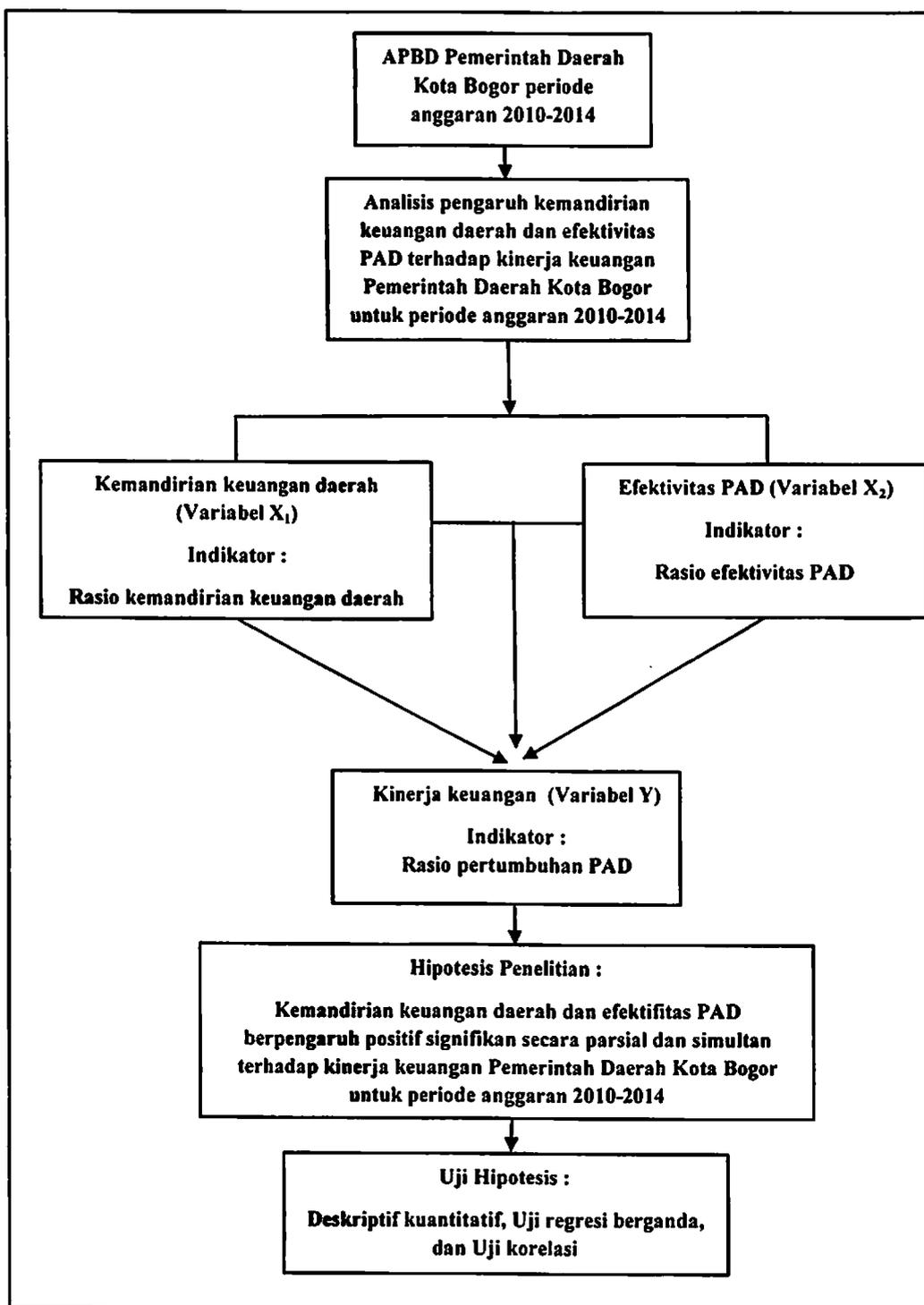
Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoretis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, yang akan disajikan dalam Gambar 4:



Gambar 4.

Kerangka Pemikiran Teoretis Pengaruh Variabel  $X_1$  dan  $X_2$  Secara Bersama-sama Berpengaruh Pada Variabel  $Y$

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis membuat paradigma penelitian sebagai berikut, yang akan disajikan dalam Gambar 5:



Gambar 5.  
Paradigma Penelitian Mengenai Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y Pada Lokasi Penelitian Tertentu

## **2.7 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian yang muncul adalah:

- Hipotesis 1 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014**
- Hipotesis 2 : Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014**
- Hipotesis 3 : Kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah penelitian terapan, “Penelitian terapan adalah penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada di suatu tempat misalnya organisasi, instansi, perusahaan” (Sujarweni, 2014:7). Penelitian terapan dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang khusus atau untuk membuat keputusan tentang suatu tindakan atau kebijakan khusus.

Jenis penelitian ini menurut metode termasuk dalam penelitian eksperimen,

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain yang kemunculan variabel lain itu dipicu oleh keadaan yang terkontrol ketat dengan tujuannya untuk mencari hubungan sebab akibat antar kedua variabel (Sujarweni, 2014:8).

Penelitian ini dilihat dari tingkat eksplanasi (penjelasan) termasuk dalam penelitian asosiatif, “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya” (Sujarweni, 2014:11).

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Definisi objek penelitian menurut Sugiyono (2013:38) yaitu:

Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemandirian keuangan daerah dan Efektivitas PAD sebagai variabel independen dan Kinerja keuangan sebagai variabel dependen.

Unit analisis penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah geografis regional, maksud dari geografis regional yang diteliti adalah daerah, sehingga data yang diperoleh adalah mengenai atau berasal dari (respon) suatu daerah tertentu. Lokasi penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data

kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik (Siregar, 2013:17).

Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yaitu riset dengan mengumpulkan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor, dan Ringkasan APBD Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014 yang didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak atau BPS (Sujarweni, 2014:73).

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, penulis akan dapat mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian, penulis dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru. Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Secara logis boleh jadi, antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa berbeda definisi operasional dalam satu penelitian yang sama. Definisi operasional juga dalam hal ini bias merujuk kepada referensi kepustakaan.

Operasionalisasi variabel dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam penggunaan instrumen penelitian untuk pengolahan data selanjutnya.

Operasionalisasi variabel merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan (bagaimana cara mengukur) dan penilaian alat ukur (Siregar, 2013:111).

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang akan diteliti, yaitu :

#### 1. Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang menjadi sebab atau merubah/memengaruhi variabel lain (variabel dependen). Juga sering disebut dengan variabel bebas, *predictor*, stimulus, eksogen. Variabel independen (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemandirian keuangan daerah sebagai variabel  $X_1$  dan Efektivitas PAD sebagai variabel  $X_2$ .

## 2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut variabel terikat, variabel respons (Siregar, 2013:10). Variabel dependen (terikat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja keuangan sebagai variabel Y. Secara lengkap operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat terlihat pada Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7.  
Operasionalisasi Variabel

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Kemandirian Keuangan Daerah (Independen/ $X_1$ )	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Efektivitas PAD (Independen/ $X_2$ )	Rasio Efektivitas PAD	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja Keuangan (Dependen/Y)	Rasio Pertumbuhan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100\%$	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sujarweni (2014:65) menyatakan bahwa populasi tidak hanya berkenaan dengan siapa tetapi juga berkenaan dengan apa yang diteliti.

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan.

Pengertian sampel menurut Sujarweni (2014:65) yaitu "Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian".

Penelitian ini menggunakan sampel data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014, yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Adapun teknik yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sujarweni, 2014:71). Pendekatan yang digunakan dalam penarikan sampel adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni, 2014:72).

Pertimbangan pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Laporan keuangan lima tahun terakhir akan memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan kinerja keuangan sehingga dapat terlihat pertumbuhan dari masing-masing variabel tersebut.
4. Laporan keuangan pada periode tersebut telah diaudit BPK.

Berdasarkan keempat pertimbangan tersebut, maka objek yang dijadikan sampel penelitian adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu riset dengan mengumpulkan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor, dan Ringkasan APBD Kota Bogor untuk periode anggaran 2010-2014 yang didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diukur dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS 20). Sedangkan untuk menguji pengaruh antara kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan digunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Menurut Gujarati (2004:74), untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor periode anggaran 2010-2014, maka dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil (*ordinary least square-OLS*). Persamaan regresi berganda menurut Gujarati (2004:74) disajikan dalam Gambar 6 sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Gambar 6.  
Persamaan Regresi Berganda

Sumber: Gujarati (2004:74)

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor TA 2010-2014

X<sub>1</sub> = Kemandirian Keuangan Daerah

X<sub>2</sub> = Efektivitas PAD

a = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dan dependen (Gujarati, 2004:74).

### 3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147).

### 3.7.2 Pengujian Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model yang tepat untuk penelitian ini, hasil regresi atas data panel kemudian diuji untuk mengetahui apakah ada permasalahan multikolinearitas, heteroskedastisitas atau autokorelasi, sehingga hasil estimasi memenuhi *Best Linear Unbiase Estimator* (BLUE) yaitu: (Gujarati, 2004: 151).

1. *Best* adalah  $\beta$  estimator yang memiliki varians minimum;
2. *Linear* artinya estimator  $\alpha$  dan  $\beta$  memiliki nilai estimator;
3. *Unbiased* berarti nilai aktual dari  $\alpha$  dan  $\beta$  harus sama dengan nilai sebenarnya;
4. *Estimator* artinya  $\beta$  sampel adalah *estimator*  $\beta$  dari populasi.

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal berarti data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median (Ghozali, 2006:165).

Ghozali (2006:165), menyebutkan bahwa untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat menggunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Dalam penelitian ini menggunakan kedua cara tersebut. Analisis statistik merupakan cara yang dianggap lebih valid dengan menggunakan keruncingan kurva untuk mengetahui bentuk distribusi data. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006:165).

Sedangkan grafik distribusi merupakan cara sederhana yang dapat mendukung analisis statistik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari sidualnya. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal. Jika data telah terdistribusi secara normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2004:177). Untuk menguji apakah varians dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi *Rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Apabila koefisien korelasi dari variabel bebas signifikan pada tingkat kekeliruan 5% mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

### 3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.01 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi nilai VIF lebih tinggi dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Singgih Santoso, 2012:242).

### 3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lainnya.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006:165). Menurut Singgih Santoso (2012:241), tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan pada regresi yang datanya adalah *time series*, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan, dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu (Singgih Santoso, 2012:241). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Singgih Santoso, 2012:242):

1. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Bila D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

### 3.7.3 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit* nya. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan nilai statistik  $t$ , nilai statistik  $F$ , dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2006:165).

#### 3.7.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik $t$ )

Untuk pengujian metode yang dipakai adalah metode pengujian hipotesis asosiatif dengan menggunakan *Two Tail Test* dengan derajat kebebasan sebesar  $n-k$  dan derajat keyakinan sebesar 95% ( $\alpha/2 = 0,025$ ) (Sugiyono, 2013:247). Uji  $t$  dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Kemandirian keuangan daerah dan Efektivitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap variabel Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Periode Anggaran 2010-2014. Secara matematis,  $t$  hitung dicari dengan rumus yang disajikan dalam Gambar 7 sebagai berikut (Gujarati, 2004:74):

$$t_h = \frac{\beta_i}{S_e(\beta_i)}$$

Gambar 7.  
Rumus Uji Statistik t

Sumber: Gujarati (2004:74)

Keterangan :

- $t_h$  = t hitung  
 $\beta$  = Koefisien regresi  
 $S_e(\beta)$  = Kesalahan standar yang ditaksir

Hipotesis yang diajukan adalah :

1. Pengaruh variabel Kemandirian Keuangan Daerah (RK) terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK)

$H_0 : \beta_1 = 0$  tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel RK terhadap variabel KK.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$  ada pengaruh yang signifikan dari variabel RK terhadap variabel KK.

2. Pengaruh variabel Efektivitas PAD (RE) terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK)

$H_0 : \beta_2 = 0$  tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel RE terhadap variabel KK.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$  ada pengaruh yang signifikan dari variabel RE terhadap variabel KK.

Kriteria pengujian :

$H_0$  ditolak apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel

$H_0$  diterima apabila  $t$  tabel  $\leq t$  hitung  $\leq t$  tabel

### 3.7.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk mengetahui pengaruh variabel Kemandirian Keuangan Daerah (RK) dan Efektivitas PAD (RE) terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK) digunakan uji F (Gujarati, 2004:120). Secara matematis F hitung ditentukan dengan rumusan yang disajikan dalam Gambar 8 sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / (k-1)}{1 - R^2 / (n-k)}$$

Gambar 8.  
Rumus Uji Statistik F

Sumber: Gujarati (2004:120)

Keterangan :

$F_h$  = F hitung

$R^2$  = Koefisien Determinasi

$k$  = Jumlah variabel yang diteliti

$n$  = Jumlah pengamatan

Dengan menggunakan *degree of freedom* 95% ( $\alpha = 0,05$ ) maka hipotesis :

$H_0 : \beta = 0$  tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel RK dan RE secara bersama-sama terhadap KK.

$H_1 : \beta \neq 0$  ada pengaruh yang signifikan dari variabel RK dan RE secara bersama-sama terhadap KK.

Kriteria pengujian :

$H_0$  ditolak apabila F hitung  $>$  F tabel.

$H_0$  diterima apabila F hitung  $\leq$  F tabel.

### 3.7.3.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik $R^2$ )

Menurut Gujarati (2004:44), analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah suatu ukuran *Goodness of Fit* untuk mengetahui seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Gujarati (2004:98), mengatakan bahwa koefisien determinasi adalah besaran yang memberikan informasi proporsi variasi dalam Y yang dijelaskan oleh variabel  $X_1$ ,  $X_2$  secara bersama-sama (gabungan). Dalam penelitian ini koefisien determinasi diartikan sebagai nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel *Working Capital Turnover* Kemandirian Keuangan Daerah (RK) ( $X_1$ ), Efektivitas PAD (RE) ( $X_2$ ) terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK) (Y). Persentase sisanya disebabkan oleh faktor lain di luar analisis.

Menurut Gujarati (2004:99), batas besaran  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$  artinya jika  $R^2$  sama dengan 1, berarti bahwa garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100 persen variasi dalam Y. Sebaliknya, jika  $R^2$  sama dengan 0, model regresi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y. Kecocokan model dikatakan lebih baik jika  $R^2$  semakin dekat dengan 1. Rumus koefisien determinasi disajikan dalam Gambar 9 sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 Y + \beta_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Gambar 9.  
Rumus Uji Statistik  $R^2$

Sumber: Gujarati (2004:99)

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

$X_1$  = Kemandirian Keuangan Daerah

$X_2$  = Efektivitas PAD

$Y$  = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor TA 2010-2014

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kota Bogor periode 2010-2014. Pemerintah Kota yang menjadi sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III. Pemerintah Daerah Kota Bogor merupakan salah satu kota di Indonesia yang tepatnya terletak di wilayah Jawa Barat. Secara geografis Kota Bogor terletak diantara 106° 48' Bujur Timur dan 6° 26' Lintang Selatan, luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Dermaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

##### 4.1.1. Sejarah Kota Bogor

Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu:

Naskah Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah berbahasa Sunda Kuna ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon Pakujajar.

K.F. Holle (1869) dalam tulisan berjudul *De Batoe Toelis te Buitenzorg* (Batutulis di Bogor), Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Holle, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar ("*op rijen staande pakoe bomen*").

G.P. Rouffaer (1919) dalam *Encyclopedie van Nederlandsch Indie* edisi Stibbe tahun 1919. Pakuan mengandung pengertian "paku", akan tetapi harus diartikan "paku jagat" (*spijker der wereld*) yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. "Pakuan" menurut Rouffaer setara dengan "Maharaja" kata "Pajajaran" diartikan sebagai "berdiri sejajar" atau "imbangan" (*evenknie*). Yang dimaksudkan Rouffaer adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Rouffaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti "Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan (Maharaja) Majapahit". Ia sependapat dengan Hoesein Djajaningrat (1913) bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433.

R. Ng.Poerbatjaraka (1921) dalam tulisan *De Batoe-Toelis bij Buitenzorg* (Batutulis dekat Bogor) ia menjelaskan bahwa kata "Pakuan" mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno "pakwwan" yang kemudian dieja "pakwan" (satu "w", ini tertulis pada Prasasti Batutulis). Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan "pakuan". Kata "pakwan" berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti "istana yang berjajar" (*aanrijen staande hoven*).

H. Ten Dam (1957) sebagai Insinyur Pertanian, Ten Dam ingin meneliti kehidupan sosial-ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya, *Verkenningen Rondom Padjajaran* (Pengenalan sekitar Pajajaran), pengertian "Pakuan" ada hubungannya dengan "lingga" (tonggak) batu yang terpancang di sebelah prasasti Batutulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam Carita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Haluwesi dan Sang Susuktunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian "paku". Ia berpendapat bahwa "pakuan" bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibukota (*hoffstad*) yang harus dibedakan dari keraton. Kata "pajajaran" ditinjaunya berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Wikler (1690) yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tanggerang (disebut juga Ciliwung dan Cisadane). Ten Dam menarik kesimpulan bahwa nama "Pajajaran" muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran dalam pengertian Ten Dam adalah Pakuan di Pajajaran atau "Dayeuh Pajajaran".

Sebutan "Pakuan", "Pajajaran", dan "Pakuan Pajajaran" dapat ditemukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2) sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada Prasasti Kebantenan di Bekasi.

Dalam naskah Carita Parahiyangan ada kalimat berbunyi "Sang Susuktunggal, inyana nu nyieunna palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata" (Sang Susuktunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana (untuk) Sri Baduga Maharaja Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu pakuan Sanghiyang Sri Ratu Dewata).

Sanghiyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut "pakuan" itu adalah "kadaton" yang bernama Sri Bima dan seterusnya. "Pakuan" adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton atau istana. Jadi tafsiran Poerbatjaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam Carita Parahiyangan, yaitu "istana yang berjajar". Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada lima (5) bangunan keraton yang masing-masing bernama: Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik "panca persada" (lima keraton). Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surasowan di Banten dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam.

Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibukota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya: nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meluas menjadi nama ibukota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya.

Pendapat Ten Dam (Pakuan = ibukota ) benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tome Pires (1513) disebutkan bahwa bahwa ibukota kerajaan Sunda itu bernama "Dayo" (dayeuh) dan terletak di daerah pegunungan, dua hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa di muara Ciliwung. Nama "Dayo" didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kalapa. Jadi jelas, orang Pelabuhan Kalapa menggunakan kata "dayeuh" (bukan "pakuan") bila bermaksud menyebut ibukota. Dalam percakapan sehari-hari, digunakan kata "dayeuh", sedangkan dalam kesusastraan digunakan "pakuan" untuk menyebut ibukota kerajaan. Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan "Pakuan" untuk nama ibukota dan "Pajajaran" untuk nama negara, seperti kebiasaan masyarakat Jawa Barat sekarang ini.

#### 4.1.2. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi Kota Bogor adalah “Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani Dan Pemerintahan Amanah”, Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bogor meliputi:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

#### 4.2. Analisis Variabel Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor data dan informasi yang diperoleh sebagai berikut :

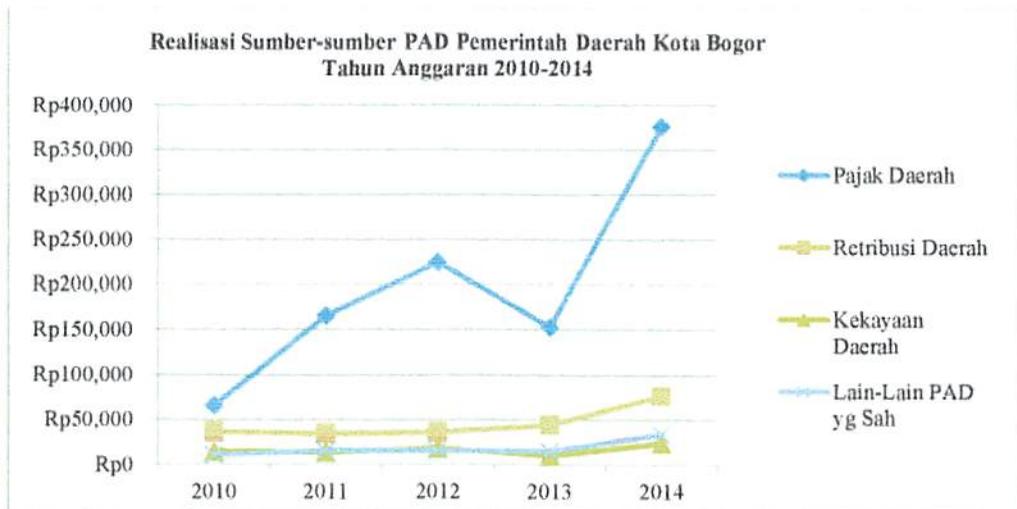
##### 4.2.1. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Tabel 8.  
Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  
Kota Bogor Tahun 2010-2014

(Dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014	
	TARGET	REALISASI								
PAJAK DAERAH	60,906	66,505	141,668	165,397	182,062	224,746	240,062	153,458	343,851	376,488
RETRIBUSI DAERAH	32,659	36,492	37,374	34,681	32,639	35,951	40,761	44,689	75,292	77,181
KEKAYAAN DAERAH	14,976	15,138	14,851	13,784	15,181	18,181	16,192	9,760	23,390	23,682
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	12,514	11,164	11,367	15,318	14,277	16,307	19,029	15,219	40,481	34,393
JUMLAH PAD	121,055	129,299	205,168	229,180	244,159	295,185	316,044	223,127	483,014	511,744

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diolah oleh penulis, 2015



Grafik 2.

Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014

Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal yang menjadi bagian dari semangat program desentralisasi. Kemandirian fiskal ini diartikan sebagai semangat dalam membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi Penerimaan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan dari dana pihak luar. Data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2010 sampai dengan 2014 disajikan dalam Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014

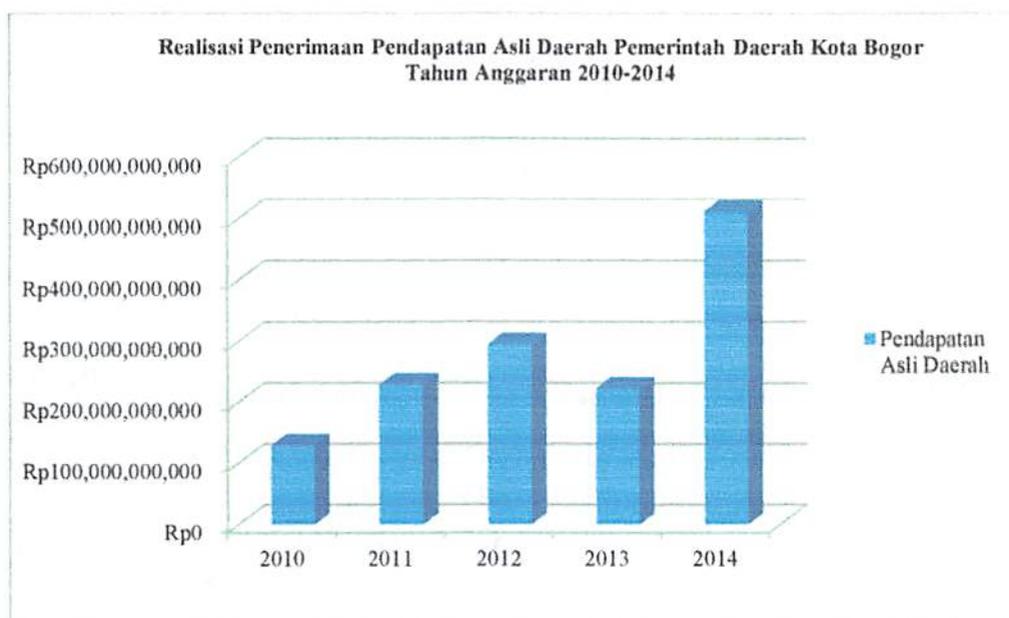
Tahun	Triwulan	Realisasi PAD	Dana Transfer	Rasio Kemandirian
2010	1	Rp28.031.568.547	Rp164.204.367.555	17,07%
	2	Rp62.734.046.884	Rp328.936.930.457	19,07%
	3	Rp91.001.254.871	Rp409.261.781.190	22,24%
	4	Rp129.298.795.670	Rp584.537.928.387	22,12%
2011	1	Rp38.834.736.040	Rp192.156.102.379	20,21%
	2	Rp102.207.889.129	Rp390.176.565.497	26,20%
	3	Rp169.970.087.856	Rp489.077.767.890	34,75%
	4	Rp229.179.989.410	Rp602.216.655.331	38,06%
2012	1	Rp57.217.666.820	Rp222.226.821.981	25,75%
	2	Rp131.693.868.811	Rp461.335.250.968	28,55%
	3	Rp198.456.784.241	Rp585.653.775.800	33,89%
	4	Rp295.184.798.441	Rp741.642.341.988	39,80%

Tabel 9.  
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Triwulan	Realisasi PAD	Dana Transfer	Rasio Kemandirian
2013	1	Rp75.987.890.340	Rp159.277.711.256	47,71%
	2	Rp137.648.019.289	Rp239.811.762.530	57,40%
	3	Rp198.921.666.100	Rp351.788.819.231	56,55%
	4	Rp223.126.808.986	Rp447.523.639.517	49,86%
2014	1	Rp101.055.997.085	Rp244.112.344.908	41,40%
	2	Rp229.341.129.464	Rp477.582.275.885	48,02%
	3	Rp379.989.347.809	Rp656.722.350.098	57,86%
	4	Rp511.743.684.270	Rp859.072.322.269	59,57%

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.id*, diolah oleh penulis, 2015

Berikut ini akan disajikan grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Grafik 3 sebagai berikut:



Grafik 3.

Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat disajikan dalam Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10.  
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25
Rendah	>25-50
Sedang	>50-75
Tinggi	>75-100

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2007:168)

Berikut ini akan disajikan Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Grafik 4 sebagai berikut:



Grafik 4.

Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kota Bogor, mengalami penurunan PAD sedangkan pada tahun yang sama Rasio Kemandirian mengalami kenaikan. Rasio Kemandirian diperoleh dari perbandingan Realisasi PAD dengan Dana Transfer, meningkatnya Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat berkurang. Pada tahun 2013 besar PAD menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar Rp 223.126.808.986 sehingga Dana Transfer yang

diterima dari Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 447.523.639.517 dan mengakibatkan naiknya Rasio Kemandirian sebesar 49,86% dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 39,80%. Jadi meskipun PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun Dana Transfer yang diterima juga berkurang sehingga Rasio Kemandirian mengalami kenaikan.

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2012 dan 2014 mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah terendah ada pada tahun anggaran 2010 dengan nilai Rp 129.298.795.670 dan Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar Rp 511.743.684.270, Peningkatan PAD setiap tahunnya juga memberi efek yang positif terhadap tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bogor.
3. Rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2014 merupakan rasio kemandirian paling tinggi dengan nilai 59,57%, tahun 2010 Pemerintah Daerah Kota Bogor berada pada tingkat kemandirian yang rendah sekali karena nilai rasio kemandiriannya dibawah 25%, pada tahun 2011-2013 tingkat rasio kemandiriannya berada pada tingkat rendah dikarenakan nilai rasio kemandiriannya berada pada nilai 25%-50%, sedangkan pada tahun 2014 tingkat rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bogor berada pada tingkat sedang dikarenakan berada pada nilai rasio kemandirian 50%-75%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam aspek keuangan sangat baik dikarenakan setiap tahunnya ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat semakin berkurang, tinggal bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bogor terus memaksimalkan setiap potensi penerimaan pendapatan daerah yang ada.

#### **4.2.2. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas) Pemerintah Daerah Kota Bogor**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target pada Laporan Realisasi Anggaran dengan tujuan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100% (seratus persen). Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Data realisasi PAD dan Target PAD diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014 disajikan dalam Tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11.  
Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

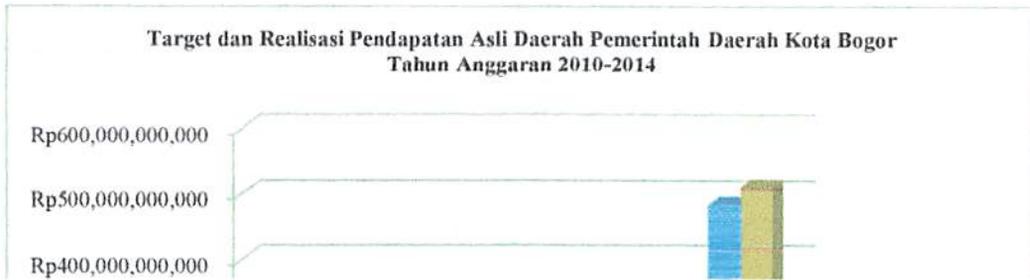
Tahun	Triwulan	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2010	1	Rp28.031.568.547	Rp30.263.797.314	92,62%
	2	Rp62.734.046.884	Rp60.527.594.628	103,65%
	3	Rp91.001.254.871	Rp90.791.391.942	100,23%
	4	Rp129.298.795.670	Rp121.055.189.256	106,81%
2011	1	Rp38.834.736.040	Rp51.292.105.918	75,71%
	2	Rp102.207.889.129	Rp102.584.211.836	99,63%
	3	Rp169.970.087.856	Rp153.876.317.753	110,46%
	4	Rp229.179.989.410	Rp205.168.423.671	111,70%
2012	1	Rp57.217.666.820	Rp61.039.704.309	93,74%
	2	Rp131.693.868.811	Rp122.079.408.619	107,88%
	3	Rp198.456.784.241	Rp183.119.112.928	108,38%
	4	Rp295.184.798.441	Rp244.158.817.237	120,90%
2013	1	Rp75.987.890.340	Rp79.010.960.571	96,17%
	2	Rp137.648.019.289	Rp158.021.921.141	87,11%
	3	Rp198.921.666.100	Rp237.032.881.712	83,92%
	4	Rp223.126.808.986	Rp316.043.842.282	70,60%
2014	1	Rp101.055.997.085	Rp120.753.605.176	83,69%
	2	Rp229.341.129.464	Rp241.507.210.352	94,96%
	3	Rp379.989.347.809	Rp362.260.815.528	104,89%
	4	Rp511.743.684.270	Rp483.014.420.704	105,95%

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diolah oleh penulis, 2015

Berikut ini akan disajikan grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Grafik 5 sebagai berikut:

banyak yang termasuk pada masa peramian tersebut

- Rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2010-2012 dan 2014 rasio efektivitas PAD diatas 100% dan masuk kriterianya sangat efektif, ini



Berdasarkan Tabel 13, dapat dijelaskan bahwa:

1. Kinerja keuangan Kota Bogor tahun 2010-2014 cukup berfluktuasi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada tahun 2014 Rp511.743.684.270, dan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah berada pada tahun 2010 Rp129.298.795.670.
2. Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, pada tahun 2010 nilai rasio pertumbuhan PAD sebesar 44,92% dan pada tahun 2011 sebesar 77,25%, peningkatan rasio pertumbuhan PAD ini terjadi karena peningkatan penerimaan PAD yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, salah satu yang mempengaruhinya karena bertambahnya sumber-sumber penerimaan PAD.
3. Rasio Pertumbuhan PAD pada tahun 2012 mengalami penurunan karena pada tahun tersebut nilai rasio pertumbuhan PAD sebesar 28,80% dan berdampak tidak baik bagi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Penurunan ini terjadi karena kurang intensifnya pemungutan sumber-sumber penerimaan PAD yang ada pada Kota Bogor.
4. Rasio Pertumbuhan PAD pada tahun 2013 menjadi terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,41%, ini disebabkan karena banyaknya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak terpungut dan juga dikarenakan pada tahun tersebut adanya pergantian Walikota Kota Bogor sehingga kebijakan banyak yang terhambat pada masa peralihan tersebut.
5. Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2014 menjadi rasio pertumbuhan PAD yang paling tinggi selama tahun 2010-2014 yaitu sebesar 129,35%, peningkatan rasio pertumbuhan PAD ini terjadi karena pada tahun tersebut banyak hotel-hotel dan restoran-restoran baru yang dibangun dan juga penerimaan dari sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah yang lainnya, sehingga realisasi penerimaan PAD meningkat secara signifikan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdampak sangat baik bagi keuangan daerah maupun kinerja keuangan daerah, karena dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor bisa meningkatkan kemandirian daerah tersebut dan juga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa berkurang. Dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan adanya perbaikan dalam pembangunan dan pengembangan daerah tersebut, khususnya yaitu perbaikan infrastruktur dan juga sarana prasarana yang masih kurang serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan urusan wajib Kota Bogor.

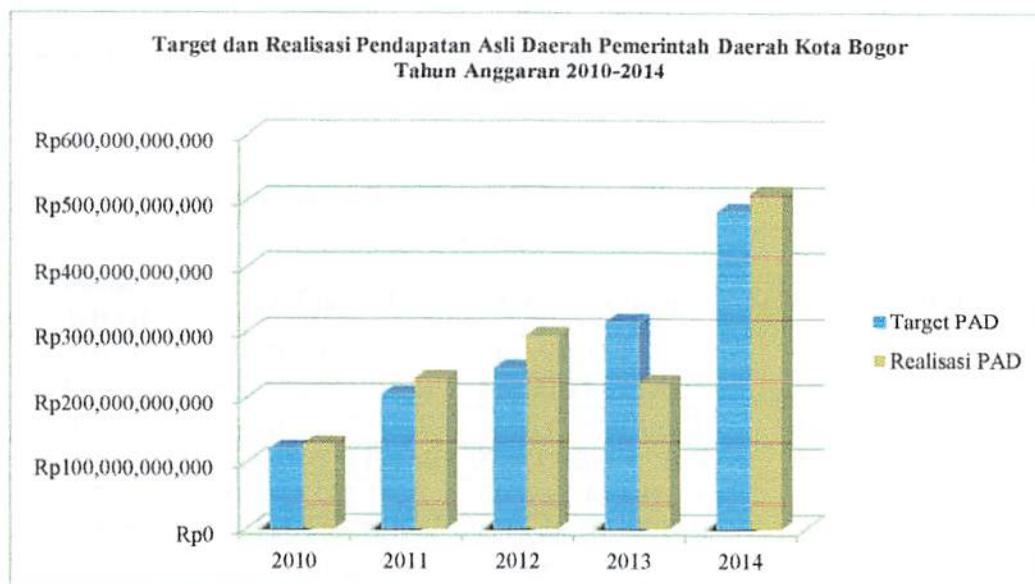
Data realisasi PAD dan Target PAD diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014 disajikan dalam Tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11.  
Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Triwulan	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2010	1	Rp28.031.568.547	Rp30.263.797.314	92,62%
	2	Rp62.734.046.884	Rp60.527.594.628	103,65%
	3	Rp91.001.254.871	Rp90.791.391.942	100,23%
	4	Rp129.298.795.670	Rp121.055.189.256	106,81%
2011	1	Rp38.834.736.040	Rp51.292.105.918	75,71%
	2	Rp102.207.889.129	Rp102.584.211.836	99,63%
	3	Rp169.970.087.856	Rp153.876.317.753	110,46%
	4	Rp229.179.989.410	Rp205.168.423.671	111,70%
2012	1	Rp57.217.666.820	Rp61.039.704.309	93,74%
	2	Rp131.693.868.811	Rp122.079.408.619	107,88%
	3	Rp198.456.784.241	Rp183.119.112.928	108,38%
	4	Rp295.184.798.441	Rp244.158.817.237	120,90%
2013	1	Rp75.987.890.340	Rp79.010.960.571	96,17%
	2	Rp137.648.019.289	Rp158.021.921.141	87,11%
	3	Rp198.921.666.100	Rp237.032.881.712	83,92%
	4	Rp223.126.808.986	Rp316.043.842.282	70,60%
2014	1	Rp101.055.997.085	Rp120.753.605.176	83,69%
	2	Rp229.341.129.464	Rp241.507.210.352	94,96%
	3	Rp379.989.347.809	Rp362.260.815.528	104,89%
	4	Rp511.743.684.270	Rp483.014.420.704	105,95%

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.id*, diolah oleh penulis, 2015

Berikut ini akan disajikan grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Grafik 5 sebagai berikut:



Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

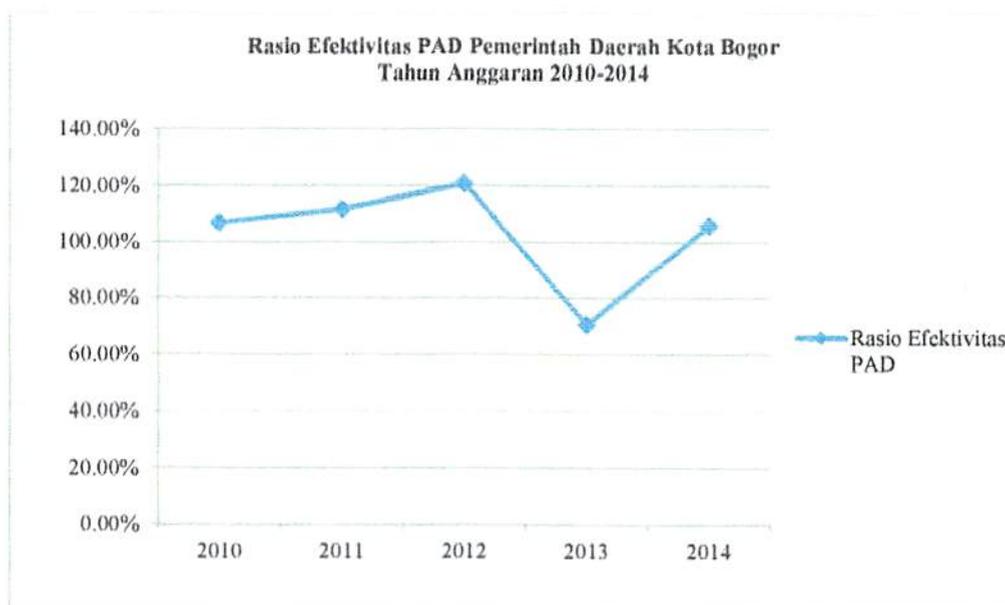
Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat disajikan dalam rasio seperti tampak pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12.  
Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 - 100
Cukup Efektif	>80 - 90
Kurang Efektif	>60 - 80
Tidak Efektif	<60

Sumber: Mahmudi (2010:158)

Berikut ini akan disajikan Grafik Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Grafik 6 sebagai berikut:



Grafik 6.

Grafik Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014

Berdasarkan Tabel 11 dan Tabel 12, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2010-2012 dan 2014 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu melampaui target dan peningkatan realisasinya cukup baik, ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor cukup baik dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang terpungut.
2. Realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2013, dikarenakan pada tahun tersebut masih sedikit potensi PAD yang dapat dioptimalkan penerimaan oleh pemerintah Kota Bogor. Realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014, dikarenakan pada tahun ini banyak sumber-sumber PAD yang baru dengan adanya pembangunan hotel-hotel dan restoran-restoran baru sehingga menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Bogor.
3. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada tahun 2013 tidak mencapai target, yaitu seperti Pajak Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan juga Lain-lain PAD yg sah, hanya retribusi daerah yang pada tahun ini yang mencapai target. Hal ini disebabkan karena banyaknya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak terpungut dan juga dikarenakan pada tahun tersebut adanya pergantian Walikota Kota Bogor sehingga kebijakan banyak yang terhambat pada masa peralihan tersebut
4. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2010-2012 dan 2014 rasio efektivitas PAD diatas 100% dan masuk kriterianya sangat efektif, ini

mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor cukup baik dalam pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD yang ada. Pada tahun 2013 efektivitas PAD berada pada kriteria kurang efektif dikarenakan rasio efektivitas pada tahun tersebut sebesar 70,60%, ini disebabkan karena pada tahun tersebut banyak sumber-sumber penerimaan PAD yang ada tidak terpungut sehingga penerimaan PAD yang ditargetkan tidak tercapai.

#### 4.2.3. Analisis Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Abdul Halim, 2002:126). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Ihyaul Ulum (2009:30) rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (*growth ratio*) adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode anggaran. Kinerja keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 disajikan dalam tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13.  
Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Triwulan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pertumbuhan PAD
2010	1	Rp28.031.568.547	34,87%
	2	Rp62.734.046.884	123,80%
	3	Rp91.001.254.871	45,06%
	4	Rp129.298.795.670	44,92%

Berdasarkan Tabel 13, dapat dijelaskan bahwa:

1. Kinerja keuangan Kota Bogor tahun 2010-2014 cukup berfluktuasi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada tahun 2014 Rp511.743.684.270, dan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah berada pada tahun 2010 Rp129.298.795.670.
2. Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, pada tahun 2010 nilai rasio pertumbuhan PAD sebesar 44,92% dan pada tahun 2011 sebesar 77,25%, peningkatan rasio pertumbuhan PAD ini terjadi karena peningkatan penerimaan PAD yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, salah satu yang mempengaruhinya karena bertambahnya sumber-sumber penerimaan PAD.
3. Rasio Pertumbuhan PAD pada tahun 2012 mengalami penurunan karena pada tahun tersebut nilai rasio pertumbuhan PAD sebesar 28,80% dan berdampak tidak baik bagi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Penurunan ini terjadi karena kurang intensifnya pemungutan sumber-sumber penerimaan PAD yang ada pada Kota Bogor.
4. Rasio Pertumbuhan PAD pada tahun 2013 menjadi terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,41%, ini disebabkan karena banyaknya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak terpunjung dan juga dikarenakan pada tahun tersebut adanya pergantian Walikota Kota Bogor sehingga kebijakan banyak yang terhambat pada masa peralihan tersebut.
5. Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2014 menjadi rasio pertumbuhan PAD yang paling tinggi selama tahun 2010-2014 yaitu sebesar 129,35%, peningkatan rasio pertumbuhan PAD ini terjadi karena pada tahun tersebut banyak hotel-hotel dan restoran-restoran baru yang dibangun dan juga penerimaan dari sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah yang lainnya, sehingga realisasi penerimaan PAD meningkat secara signifikan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdampak sangat baik bagi keuangan daerah maupun kinerja keuangan daerah, karena dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor bisa meningkatkan kemandirian daerah tersebut dan juga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa berkurang. Dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan adanya perbaikan dalam pembangunan dan pengembangan daerah tersebut, khususnya yaitu perbaikan infrastruktur dan juga sarana prasarana yang masih kurang serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan urusan wajib Kota Bogor.

Tabel 13.  
Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Triwulan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pertumbuhan PAD
2011	1	Rp38.834.736.040	-69,97%
	2	Rp102.207.889.129	163,19%
	3	Rp169.970.087.856	66,30%
	4	Rp229.179.989.410	77,25%
2012	1	Rp57.217.666.820	-75,03%
	2	Rp131.693.868.811	130,16%
	3	Rp198.456.784.241	50,70%
	4	Rp295.184.798.441	28,80%
2013	1	Rp75.987.890.340	-74,26%
	2	Rp137.648.019.289	81,14%
	3	Rp198.921.666.100	44,51%
	4	Rp223.126.808.986	24,41%
2014	1	Rp101.055.997.085	-54,71%
	2	Rp229.341.129.464	126,94%
	3	Rp379.989.347.809	65,69%
	4	Rp511.743.684.270	129,35%

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.id*, diolah oleh penulis, 2015

Berikut ini akan disajikan Grafik Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Grafik 7 sebagai berikut:



Grafik 7.

Grafik Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun 2010-2014

### 4.3. Analisis Data

#### 4.3.1. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Pelaksanaan pembangunan di seluruh Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat direalisasikan berkat adanya dukungan anggaran yang bersumber dari daerah sendiri seperti PAD dan bersumber dari dana perimbangan. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147). Berikut ini akan disajikan hasil statististik deskriptif dalam Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14.  
Hasil Statistik Deskriptif  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RK	20	17,07	59,57	37,3040	16,02987
RE	20	70,60	120,90	90,9500	18,17625
KK	20	-75,03	163,19	41,4554	60,26171
Valid N (listwise)	20				

Sumber : Output SPSS V.20

Dari tabel 14, dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 20. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Statistik Deskriptif Rasio Kemandirian (RK) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang

dapat diandalkan bagi daerah. Akan tetapi, secara umum untuk Pemerintah Daerah besarnya kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD sangat bervariasi sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah.

Dari tabel 14 dapat dilihat, Rasio Kemandirian PAD yang terendah yakni sebesar 17,07% terjadi pada triwulan 1 tahun 2010. Untuk Rasio Kemandirian PAD terbesar yaitu 59,57% yang terjadi pada triwulan 4 tahun anggaran 2014. Dengan demikian selama periode 2010-2014 rata-rata Rasio Kemandirian PAD di Kota Bogor adalah sebesar 37,3040% dengan standar deviasi sebesar 16,02987%.

Dari penjelasan tersebut, bahwa selama ini Rasio Kemandirian PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peranan yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

## 2. Statistik Deskriptif Rasio Efektivitas PAD (RE) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100% (seratus persen). Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Dari tabel 14 dapat dilihat, Rasio Efektivitas PAD pada Pemerintahan Kota Bogor yang terendah yakni sebesar 70,60% terjadi pada triwulan 4 tahun 2013. Untuk Rasio Efektivitas PAD terbesar yaitu 120,90% terjadi pada triwulan 4 tahun 2012. Dengan demikian selama periode 2010-2014 rata-rata Rasio Efektivitas PAD di Kota Bogor adalah sebesar 90,9500% dengan standar deviasi sebesar 18,17625%.

Dari penjelasan tersebut, bahwa efektivitas PAD pada Kota Bogor cukup baik dikarenakan rata-rata setiap tahunnya untuk rasio efektivitas PAD antara > 90%-100% dan termasuk kategori efektif.

## 3. Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan (KK) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah

Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Abdul Halim, 2002:126). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat, Rasio Pertumbuhan PAD pada Pemerintah Kota Bogor yang terendah yakni sebesar -75,03% terjadi pada triwulan 1 tahun 2012. Untuk Rasio Pertumbuhan PAD terbesar yaitu 163,19% terjadi pada triwulan 2 tahun 2011. Dengan demikian selama periode 2010-2014 rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD di Kota Bogor adalah sebesar 41,4554% dengan standar deviasi sebesar 60,26171%.

Dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PAD di Kota Bogor tidak konsisten selama tahun 2010-2014, ini disebabkan karena kurang intensifnya pengawasan terhadap potensi PAD yang ada sehingga potensi penerimaan PAD yang harusnya terpungut menjadi tidak terpungut. Akan tetapi 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan terhadap pertumbuhan PAD yang berdampak baik bagi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

#### **4.3.2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Adapun uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

##### **4.3.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan Uji normalitas yang digunakan adalah dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, apabila nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut ini akan disajikan hasil uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov Test* dalam Tabel 15 sebagai berikut:

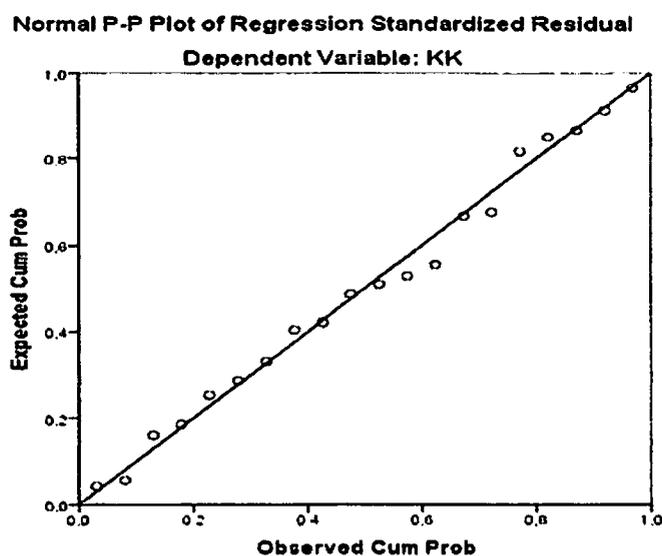
Tabel 15.  
 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov Test*  
*One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

		RK	RE	KK	Unstandardized Residual
N		20	20	20	20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	37,3040	90,9500	41,4554	0E-7
	Std. Deviation	16,02987	18,17625	60,26171	59,56959439
Most Extreme Differences	Absolute	,183	,387	,176	,322
	Positive	,159	,178	,137	,223
	Negative	-,193	-,357	-,165	-,310
Kolmogorov-Smirnov Z		,434	,789	,365	,645
Asymp. Sig. (2-tailed)		,946	,545	,999	,764

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS V.20

Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat nilai signifikansi yang diperoleh Asymp.sig. (2-tailed) Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Kinerja Keuangan yaitu 0,946; 0,545; dan 0,999. Karena nilai signifikansi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Kinerja Keuangan yang dihasilkan berada di atas 0,05, maka nilai residual tersebut telah berdistribusi normal. Sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi uji normalitas. Untuk mempertegas hasil uji normalitas, dapat dilihat dari gambar P Plot seperti dalam Gambar 10 dibawah ini:

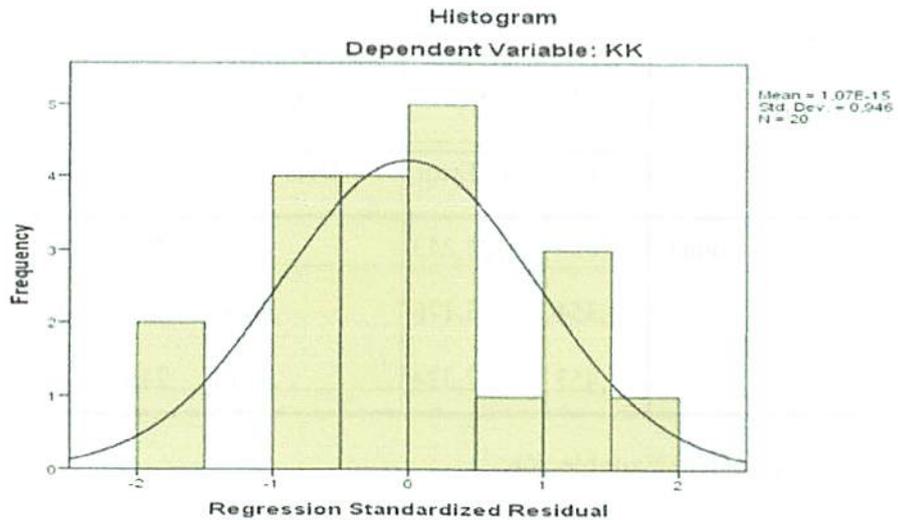


Sumber: Output SPSS V.20

Gambar 10.

P Plot Normalitas

Untuk mempertegas hasil uji normalitas, dapat dilihat dari gambar grafik Normalitas seperti dalam Grafik 8 dibawah ini:



Sumber : Output SPSS V.20

Grafik 8.

#### Grafik Normalitas

Berdasarkan grafik histogram diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal. Dan berdasarkan grafik P Plot menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal, karena titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

#### 4.3.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,01 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi nilai VIF lebih tinggi dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Berikut ini akan disajikan hasil uji Multikolonieritas *Variance Inflation Factor* dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16.  
Hasil Uji Multikolonieritas *Variance Inflation Factor*  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	81,023	323,243		,250	,823	
	RK	2,354	3,176	,249	4,453	,040	,893
	RE	,453	2,324	,181	,245	,789	,893

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Output SPSS v.20

Berdasarkan Tabel 16, pada kolom VIF dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk Rasio Kemandirian sebesar 1,120 dan Rasio Efektivitas sebesar 1,120. Nilai VIF variabel independen tersebut yaitu lebih dari 0,1 dan juga nilai *tolerance* Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas sebesar 0,893 diatas batas minimum yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolonieritas (*multicollnearity*) diantara variabel bebas.

#### 4.3.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika dilihat pada statistik Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Berikut ini akan disajikan hasil uji Autokorelasi dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17.  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>	
Durbin-Watson	
1,612	

a. Predictors: (Constant), RE, RK

b. Dependent Variable: KK

Uji Autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson, *DW test* digunakan untuk Autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel pengganggu diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Singgih (2000), bila angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi Autokorelasi. Berdasarkan Tabel 17, nilai Durbin-Watson 1,612 diantara -2 sampai +2 maka data yang digunakan tidak terjadi autokolerasi.

#### 4.3.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, karena jika terdapat heteroskedastisitas maka varians tidak konstan dapat menyebabkan biasanya *standar error*. Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel *Correlations* dengan melihat nilai Sig. (2-tailed) pada kolom *Unstandardized Residual*. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai Sig. (2-tailed) > 0,05. Berikut ini akan disajikan hasil uji Heteroskedastisitas dalam Tabel 18 sebagai berikut

Tabel 18.  
Hasil Uji Heteroskedastisitas  
*Correlations*

		RK	RE	KK
RK	Correlation Coefficient	1,000	-,500	,200
	Sig. (2-tailed)	.	,391	,747
	N	20	20	20
Spearman's rho RE	Correlation Coefficient	-,500	1,000	-,300
	Sig. (2-tailed)	,391	.	,624
	N	20	20	20
KK	Correlation Coefficient	,200	-,300	1,000
	Sig. (2-tailed)	,753	,673	.
	N	20	20	20

Sumber: Output SPSS V.20

Pada Tabel 18, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan output SPSS tabel *Correlations* dengan melihat nilai Sig. (2-tailed) pada kolom *Unstandardized Residual* pada masing-masing variabel.

Berdasarkan tabel korelasi tersebut, diketahui bahwa nilai sig. (*2-tailed*) untuk korelasi antara Rasio Kemandirian dengan *Unstandardized Residual* sebesar 0,753. Karena nilai sig. (*2-tailed*) RK > 0,05. Maka, variabel tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Sedangkan untuk korelasi antara Rasio Efektivitas dengan *Unstandardized Residual* sebesar 0,673. Karena nilai sig. (*2-tailed*) RE > 0,05. Maka, variabel tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan semua pengujian telah memenuhi kriteria BLUE, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis untuk analisis regresi berganda.

Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan (KK)

a = Konstanta

X<sub>1</sub> = Rasio Kemandirian (RK)

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi

X<sub>2</sub> = Rasio Efektivitas (RE)

e = Error

Berikut ini akan disajikan hasil uji Regresi Linier Berganda dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19.  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	81,023	323,243		,250	,823		
	RK	2,354	3,176	,249	4,453	,040	,893	1,120
	RE	,453	2,324	,181	,245	,789	,893	1,120

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Output SPSS v.20

Dari Tabel 19, *Coefficients* di atas bila dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* kolom B, persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 81,023 + 2,354RK + 0,453RE$$

Persamaan regresi linier sederhana di atas, mempunyai arti sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 81,023 menyatakan bahwa jika Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas adalah nol, maka Kinerja Keuangan yang terjadi adalah sebesar 81,023 satuan.
2. Rasio Kemandirian memiliki koefisien bertanda positif sebesar 2,354, artinya bahwa setiap kenaikan Rasio Kemandirian satu satuan maka variabel Kinerja Keuangan (Y) akan naik sebesar 2,354 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Rasio Efektivitas memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,453, artinya bahwa setiap kenaikan Rasio Efektivitas satu satuan maka variabel Kinerja Keuangan (Y) akan naik sebesar 0,453 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Dari hasil regresi di atas tampak bahwa peran Rasio Kemandirian lebih besar dibandingkan dengan peran yang diberikan Rasio Efektivitas terhadap nilai Kinerja Keuangan. Hal ini dapat diunjukkan dimana nilai koefisien regresi  $RK > RE$  yakni  $2,354 > 0,453$ . Seperti diketahui bahwa Rasio Efektivitas hanya menbandingkan target dengan realisasi sehingga kurang mencerminkan tingkat capaian keuangan yang didapat. Sedangkan Rasio Kemandirian yang terus meningkat setiap tahunnya mengakibatkan Kinerja Keuangan juga ikut meningkat, sehingga porsi (persentase) Rasio Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan porsi (persentase) Rasio Efektivitas terhadap Kinerja Keuangan Kota Bogor.

#### **4.3.4. Pengujian Hipotesis**

##### **4.3.4.1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji Statistik t)**

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial atau tidak terhadap variabel dependen. Berikut ini akan disajikan hasil uji Statistik t dalam Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20.  
Hasil Uji Statistik t  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	81,023	323,243		,250	,823		
	RK	2,354	3,176	,249	4,453	,040	,893	1,120
	RE	,453	2,324	,181	,245	,789	,893	1,120

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Output SPSS v.20

Berdasarkan Tabel 20, variabel Rasio Kemandirian (RK) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,453 dengan taraf signifikansi sebesar 0,040 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan melebihi nilai t-tabel sebesar 2,110. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel ( $4,453 > 2,110$ ) yang memiliki arti bahwa Rasio Kemandirian secara signifikan mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H1 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

Sedangkan untuk variabel Rasio Efektivitas (RE) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,245 dengan taraf signifikansi sebesar 0,789 yang lebih besar dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,110. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel ( $0,245 < 2,110$ ) yang memiliki arti bahwa Rasio Efektivitas Kota Bogor tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H2 ditolak, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

#### 4.3.4.2. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA dengan melihat kolom Sig. apabila nilai Sig. < 0,05 maka variabel dependen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini akan disajikan hasil uji Statistik F dalam Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21.  
Hasil Uji Statistik F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1198,241	2	536,132	7,643	,027 <sup>b</sup>
	Residual	15242,146	17	7017,046		
	Total	16251,451	19			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), RE, RK

Sumber: Output SPSS v.20

Berdasarkan Tabel 21, menunjukkan hasil penghitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 7,643 dengan taraf signifikansi sebesar 0,027, sedangkan nilai F-tabel sebesar 3,59. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung > F-tabel ( $7,643 > 3,59$ ) yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian (RK) dan variabel Rasio Efektivitas (RE) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK) di Kota Bogor.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang dapat dikatakan bahwa variabel Rasio Kemandirian (RK) dan Rasio Efektivitas (RE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan (KK) di kota Bogor.

#### 4.3.4.3. Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 22 dan Tabel 23 sebagai berikut:

Tabel 22.  
Hasil Uji Koefisien Korelasi Rasio Kemandirian

*Model Summary*<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,745 <sup>a</sup>	,656	,519	971,42412

- a. Predictors: (Constant), RK  
 b. Dependent Variable: KK

Berdasarkan Tabel 22, Uji Koefisien Determinasi dapat diketahui bahwa hasil koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,745 atau 74,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yakni Rasio Kemandirian berpengaruh kuat terhadap Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

**Tabel 23.**  
 Hasil Uji Koefisien Korelasi Rasio Efektivitas PAD  
*Model Summary<sup>b</sup>*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,114 <sup>a</sup>	,055	,031	323,45215

- a. Predictors: (Constant), RE  
 b. Dependent Variable: KK

Berdasarkan Tabel 23, Uji Koefisien Determinasi dapat diketahui bahwa hasil koefisien Determinasi (R) adalah sebesar 0,114 atau 11,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yakni Rasio Efektivitas PAD berpengaruh lemah terhadap Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen Rasio Kemandirian (RK) dan Rasio Efektivitas PAD (RE) bersama-sama sebesar 0,859 (0,745 + 0,114) atau 85% berpengaruh kuat terhadap Kinerja Keuangan Kota Bogor dan sisanya 15% dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut:

#### 4.4.1. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) dengan arah positif, karena nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Nilai  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel ( $4,453 > 2,110$ ) dan nilai signifikansi di bawah batas minimum  $0,05$  yaitu ( $0,040 < 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara rasio kemandirian dengan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. Jadi semakin tinggi Rasio Kemandirian maka Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) pun meningkat.

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misalnya untuk infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, PAD menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah dan juga bisa berdampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor.

Berikut ini akan disajikan perbandingan Rasio Kemandirian, Kinerja Keuangan, dan Kemampuan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24.  
Rasio Kemandirian, Kinerja Keuangan, dan Kemampuan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010–2014

Tahun	Rasio Kemandirian	Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD)	Kemampuan Keuangan
2010	22,12%	44,92%	Rendah Sekali
2011	38,06%	77,25%	Rendah
2012	39,80%	28,80%	Rendah
2013	49,86%	24,41%	Rendah
2014	59,57%	129,35%	Sedang

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), diolah oleh penulis, 2015

Dari tabel 24, dapat dilihat bahwa selama periode 2010-2014 rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Bogor terus meningkat dari 22,12% ke 59,57%, hal ini menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan realisasi penerimaan PAD pada Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pada tahun 2010 nilai rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 22,12% diikuti dengan rasio pertumbuhan PAD sebesar 44,92%, pada tahun ini besar realisasi penerimaan PAD tergolong rendah sekali karena masih berada di bawah 25% dari target yang telah ditetapkan.

Rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga 2013 yaitu sebesar 49,86% meskipun pada tahun tersebut rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan yaitu sebesar 24,41%, hal ini disebabkan oleh dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan sehingga Pemerintah Daerah Kota Bogor berupaya meningkatkan realisasi penerimaan PAD yaitu sebesar 25%-50% dari target yang ditetapkan agar dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri meskipun masih tergolong rendah.

Pada tahun 2014 nilai rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 59,57% kemudian diikuti dengan rasio pertumbuhan PAD sebesar 129,35%, pada tahun ini besar realisasi penerimaan PAD masuk ke dalam kategori sedang, karena besar persentase telah melampaui 50% dari target yang telah ditetapkan.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah yang semakin tinggi.

Berdasarkan analisis selama penelitian tahun 2010-2014 ditemukan masih banyaknya PAD di Kota Bogor yang belum dikelola secara optimal antara lain retribusi parkir kendaraan bermotor, berkembangnya hotel, restoran, dan tempat hiburan/wisata baru yang bisa menjadi potensi penerimaan PAD yang cukup menjanjikan. Pemerintah Daerah Kota Bogor harus lebih intensif lagi dalam pelaksanaan pemungutan Penerimaan Asli Daerah, dengan meningkatnya rasio kemandirian PAD akan berdampak baik bagi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

#### 4.4.2. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas) terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD), karena nilai  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel. Nilai  $t$ -hitung  $<$   $t$ -tabel ( $0,245 < 2,110$ ) dan nilai signifikansi di atas batas minimum  $0,05$  yaitu ( $0,789 < 0,05$ ) yang memiliki arti bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) di Kota Bogor.

Berikut ini akan disajikan perbandingan Rasio Efektivitas PAD, Kinerja Keuangan, dan Kemampuan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2010-2014 dalam Tabel 25 sebagai berikut:

Tabel 25.  
Rasio Efektivitas PAD, Kinerja Keuangan, dan Kemampuan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010–2014

Tahun	Rasio Efektivitas PAD	Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD)	Kemampuan Keuangan
2010	106,81%	44,92%	Sangat Efektif
2011	111,70%	77,25%	Sangat Efektif
2012	120,90%	28,80%	Sangat Efektif
2013	70,60%	24,41%	Kurang Efektif
2014	105,95%	129,35%	Sangat Efektif

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.id*, diolah oleh penulis, 2015

Dari tabel 25, dapat dilihat bahwa selama periode 2010-2014 rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan yang fluktuatif kecuali di tahun 2013 terdapat penurunan, namun bila dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan maka Pemerintah Daerah Kota Bogor tergolong sangat efektif dan berkinerja baik.

Pada tahun 2010-2012 nilai rasio efektivitas PAD terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 120,90% dan rasio pertumbuhan PAD sebesar 28,80% hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD pada Pemerintah Daerah Kota Bogor tergolong sangat efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan yaitu di atas 100%.

Pada tahun 2013 nilai rasio efektivitas PAD mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,60% diikuti dengan

penurunan rasio pertumbuhan PAD sebesar 24,41%, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terdapat sumber-sumber penerimaan PAD yang tidak terpungut secara optimal sehingga realisasi penerimaan PAD hanya sebesar 70,60 % dari target yang telah ditetapkan sehingga masuk ke dalam kategori kurang efektif.

Pada tahun 2014 nilai rasio efektivitas PAD kembali mengalami peningkatan dan masuk ke dalam kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut realisasi penerimaan PAD telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 105,95% dan diiringi dengan rasio pertumbuhan PAD yang meningkat yaitu sebesar 129,35%.

Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan hasil pengelolaan data rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, namun untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, terhadap rasio efektivitas tersebut perlu disandingkan dengan tingkat efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis selama penelitian tahun 2010-2014 rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor selalu di atas 100%, namun pada tahun 2013 ditemukan bahwa realisasi penerimaan PAD belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan belum ada peraturan/standar baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemungutan dan penyetoran PAD ke kas daerah, dengan mempertimbangkan segi efektivitas dan efisiensi biaya dalam memungut PAD tersebut. Salah satu caranya adalah dengan sistem pemungutan berbasis *on line*, mengingat selama ini proses pemungutan dan penyetoran PAD masih menggunakan cara manual, dan harus ada efisiensi dari biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seperti honorarium untuk pejabat atas pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

#### **4.4.3. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas) terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio efektivitas PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD), yakni terlihat dari koefisien determinasi Kota Bogor sebesar 85,9% dan 14,1% selebihnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas PAD) dengan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Bogor. Jadi semakin tinggi Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio

efektivitas PAD) maka Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) pun semakin meningkat.

Berikut ini akan disajikan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Pertumbuhan PAD dalam Tabel 26 sebagai berikut:

Tabel 26.  
Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan PAD  
Pemerintah Daerah Kota Bogor  
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas	Rasio Pertumbuhan PAD
2010	22,12%	106,81%	44,92%
2011	38,06%	111,70%	77,25%
2012	39,80%	120,90%	28,80%
2013	49,86%	70,60%	24,41%
2014	59,57%	105,95%	129,35%

Sumber: *www.djpk.depkeu.go.id*, diolah oleh penulis, 2015

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat berdampak baik bagi keuangan daerah maupun kinerja keuangan daerah, karena dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor bisa meningkatkan kemandirian daerah tersebut dan juga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa berkurang. Dengan meningkatnya Penerimaan Asli Daerah diharapkan adanya perbaikan dalam pembangunan dan pengembangan daerah tersebut, khususnya yaitu perbaikan infrastruktur dan juga sarana prasarana yang masih kurang serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan urusan wajib Kota Bogor.

Rasio efektivitas PAD Kota Bogor cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2010-2012 dan 2014 rasio efektivitas PAD diatas 100% dan masuk kriteria sangat efektif, ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor cukup baik dalam pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD yang ada. Pada tahun 2013 efektivitas PAD berada pada kriteria kurang efektif dikarenakan rasio efektivitas pada tahun tersebut sebesar 70,60%, ini disebabkan karena pada tahun tersebut banyak sumber-sumber potensi yang ada tidak terpungut sehingga penerimaan PAD yang ditargetkan tidak tercapai, seperti Pajak Daerah yang ditargetkan Rp240.062.000.000. hanya dapat direalisasikan Rp153.458.000.000, Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari target Rp16.192.000.000 hanya dapat direalisasikan Rp9.760.000.000, dan juga Lain-lain PAD yang Sah dari target Rp19.029.000.000 hanya dapat direalisasikan Rp15.219.000.000.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun dan pada tahun 2014 merupakan rasio kemandirian paling tinggi dengan nilai 59,57%, tahun 2010 Kota Bogor berada pada tingkat kemandirian yang rendah sekali karena nilai rasio kemandiriannya dibawah 25%, pada tahun 2011-2013 tingkat rasio kemandiriannya berada pada tingkat rendah dikarenakan nilai rasio kemandiriannya berada pada nilai 25%-50%, sedangkan pada tahun 2014 tingkat rasio kemandirian Kota Bogor berada pada tingkat sedang dikarenakan berada pada nilai rasio kemandirian 50%-75%.

Dari penjelasan tersebut, bahwa selama ini Rasio Kemandirian PAD Kota Bogor setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peranan yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perbaikan kinerja keuangan Kota Bogor. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bogor dalam aspek keuangan sangat baik dikarenakan setiap tahun ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat semakin berkurang, tinggal bagaimana Kota Bogor terus memaksimalkan setiap potensi penerimaan pendapatan daerah yang ada.

Dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PAD di Kota Bogor tidak konsisten selama tahun 2010-2014, ini disebabkan karena kurang intensifnya pengawasan Pemerintah Kota Bogor terhadap potensi PAD yang ada sehingga potensi penerimaan PAD yang harusnya terpungut menjadi tidak terpungut. Akan tetapi tiga (3) tahun terakhir menunjukkan peningkatan terhadap pertumbuhan PAD yang berdampak baik bagi kinerja keuangan Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor harus lebih meningkatkan lagi penerimaan PAD agar rasio kemandirian maupun rasio efektivitas PAD lebih meningkat lagi yang diharapkan akan memperbaiki kondisi kinerja keuangan Kota Bogor.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2010-2014. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan persamaan regresi linier berganda.

Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi normal bebas dari multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa:

1. Secara simultan variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) dan Efektivitas PAD (Rasio Efektivitas) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan. Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi 0,027 berada dibawah 0,05 yang berarti secara simultan variabel-variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan.
2. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) memiliki t hitung sebesar 4,453 dengan taraf signifikansi 0,040 dibawah signifikansi 0,05% (5%). Dengan demikian  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau  $4,453 > 2,110$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) mempengaruhi Kinerja Keuangan, hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis (H1) diterima. Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Hal ini didukung dengan hasil analisis dalam penelitian yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kota Bogor sangat baik, dengan meningkatnya penerimaan PAD setiap tahun akan berpengaruh terhadap meningkatnya kondisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

3. Variabel Efektivitas PAD (Rasio Efektivitas) memiliki t hitung sebesar 0,245 dengan taraf signifikansi 0,789 diatas signifikansi 0,05% (5%). Dengan demikian  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel atau  $0,245 < 2,110$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas PAD (Rasio Efektivitas) tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan, hasil ini membuktikan bahwa Hipotesis (H2) ditolak. Efektivitas PAD (Rasio Efektivitas) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Hal ini didukung dengan hasil analisis dalam penelitian yaitu selama periode 2010-2014 rata-rata Rasio Efektivitas PAD di Kota Bogor adalah sebesar 103,192%. Dengan demikian efektivitas PAD pada Kota Bogor cukup baik dikarenakan rata-rata setiap tahunnya untuk rasio efektivitas PAD berada di atas 100% dan termasuk kategori sangat efektif.

4. Hasil uji koefisien korelasi ( $R^2$ ), diketahui bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) Dan Efektivitas PAD (Rasio Efektivitas) mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Kota Bogor untuk periode anggaran tahun 2010-2014 sebesar 85,9%. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) dan Efektivitas PAD (Rasio Efektivitas) mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Kota Bogor untuk periode anggaran tahun 2010-2014 sebesar 85,9% sedangkan sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
5. Tahun 2010-2014 ditemukan masih banyak PAD di Kota Bogor yang belum dikelola secara optimal antara lain retribusi parkir kendaraan bermotor, berkembangnya hotel, restoran, dan tempat hiburan/wisata baru yang bisa menjadi potensi penerimaan PAD yang cukup menjanjikan.
6. Tahun 2010-2014 rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor selalu di atas 100%, namun pada tahun 2013 ditemukan bahwa realisasi penerimaan PAD belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan belum ada peraturan/standar baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemungutan dan penyetoran PAD ke kas daerah, dengan mempertimbangkan segi efektivitas dan efisiensi biaya dalam memungut PAD tersebut.
7. Tahun 2010-2014 pertumbuhan PAD di Kota Bogor terjadi secara fluktuatif, hal ini disebabkan karena kurang intensifnya pengawasan Pemerintah Kota Bogor terhadap potensi PAD yang ada sehingga potensi penerimaan PAD yang harusnya terpengungut menjadi tidak terpengungut.

## 5.2. Saran

1. Saran bagi Pemerintah:
  - a. Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara intensif dan tepat sasaran terutama pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilaksanakan strategi melalui Intensifikasi yaitu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan aspek pendataan agar selalu diperbaharui, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat serta pengawasan secara berkelanjutan.

- b. Melakukan evaluasi kembali terhadap sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah terutama penggunaan sistem *on line* dan melakukan efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah sehingga diperoleh ukuran yang lebih baik pada tingkat rasio efektifitas keuangan daerah.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya :  
Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan tahun penelitian lebih banyak lagi agar lebih meyakinkan perbandingan hasil yang diteliti sehingga nanti akan lebih terlihat perbandingannya dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2001), *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ (2002), *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_ (2007), *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ (2012), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi ke tiga, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Alfionita Putri Yuana (2014), *Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Ketimpangan Regional di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)*, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Andita Puspita Wardhani (2011), *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005-2010*, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Jawa Tengah.
- Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011), *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Institut Manajemen Telkom Bandung, Bandung.
- Damang (2011), *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta.
- Deddi Nordiawan (2010), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ke dua, Jakarta, Salemba Empat.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey & Roy Kelly (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, UI-Press.
- Dwirandra (2008), *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006*, Jurnal Akuntansi Bisnis, Volume III Nomor 2 Juli 2008, Halaman 133-143.
- Fitriyah Agustin (2007), *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)*, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

- Gibson, James L (2006), *Organizations (Behavior, Structure, Processes), Twelfth Edition*, McGraw Hill.
- Gie, The Liang (1986), *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*, Yogyakarta, Karya Pustaka.
- Gujarati, Damodaran (2004), *Basic Econometrics, Fourth Edition*, McGraw Hill.
- Hamrolie Harun (1990), *Penuntun Analisis Peningkatan Dana Perimbangan Kota*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Hendro Sumarjo (2010), *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Herlina Rahman (2003), *Panduan Brevet Pajak*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hersey, Paul & Kenneth Blanchard (2001), *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumberdaya Manusia*, Cetakan Ketiga, Alih Bahasa: Agus Dharma, Jakarta, Erlangga.
- Hony Adhiantoko (2013), *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)*, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ibnu Syamsi (1986), *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*, Jakarta, CV Rajawali.
- Ihyaul Ulum M.D (2009), *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Imam Ghozali (2006) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Indra Bastian (2001), *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi pertama, Yogyakarta, BPFE UGM.
- \_\_\_\_\_ (2006), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Jones, Rowan & Maurice Pendlebury (2000), *Public Sector Accounting. 5<sup>th</sup> Edition*, London, Pitman Publishing.

Machfud Sidik (2002), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.

\_\_\_\_\_ (2002), *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional: *Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*, Yogyakarta, 20 April 2002.

Machfud Sidik, Djoko Hidayanto, Ismail Tjip Kadjatmiko, Pakpahan, Arlen Tobana, & Adriansyah (2004), *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.

Mahmudi (2007), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.

\_\_\_\_\_ (2010), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mamesah. D. J (1995), *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.

Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Munir (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi ke empat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Oesi Agustina (2013), *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011)*, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005), Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (2013), Jakarta.
- Purbayu Budi Santosa & Retno Puji Rahayu (2005), *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmita (2011), *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Makassar, Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Payaman J (2005), *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Singgih Santoso (2012), *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Siregar, Syofian (2013), *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sri Widada (2012), *Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten*, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Steers, Richard M (1985), *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung, Alfabeta.
- Sumadji P, Yudha Pratama, & Rosita (2006), *Kamus Ekonomi Lengkap*, Cetakan Pertama, Jakarta, Wacana Intelektual Press.
- Susilo Martoyo (1998), *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, Yogyakarta, BPFE.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S (2007), *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003), Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (2004), Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014), Jakarta.

Wiratna Sujarweni (2014), *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.

## JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan												
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept
1	Pengajuan Judul	*												
2	Studi Pustaka		****	****										
3	Pembuatan Makalah Seminar				****	****	**							
4	Seminar									****				
5	Pengesahan										*			
6	Pengumpulan Data							****						
7	Pengolahan Data								****					
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan									****	****	****	****	
9	Sidang Skripsi													*
10	Penyempurnaan Skripsi													*
11	Pengesahan													*

\* = Menunjukkan satuan minggu